



**DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERDIDIK DI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI

**Oleh:
ACHMAD FIDAUSI HALIMI
NIM 140810101061**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



**DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERDIDIK DI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
ACHMAD FIRDAUSI HALIMI
NIM 140810101061

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah saya haturkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan meridhoi setiap langkah untuk mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat di dunia maupun di akhirat, dan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa banyak inspirasi dalam hidup, serta doa dan dukungan dari sahabat-sahabat tercinta. Karya ini merupakan langkah awal dari perjuangan saya untuk mewujudkan cita-cita, dengan rasa syukur skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Baihaki dan Ibunda Siti Aminah yang telah mendoakan, memperjuangkan, dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini. Beliau selalu menjadi pegangan saya selama saya menjalani kehidupan. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ayah dan Ibu berikan kepada saya.
2. Guru-guru dari saya masih di Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas, serta Dosen-dosen Perguruan Tinggi yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya dengan penuh kesabaran.
3. Teman-temanku mulai sejak kecil hingga sekarang yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta nasehat-nasehat dalam menjalani pendidikan dan kehidupan selama ini.
4. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang memberikan banyak pelajaran baik di bidang akademik maupun non akademik

MOTTO

“Ketika semua hal di sekitarmu terasa begitu berat,
tunjukkan pada mereka seberapa kuat dirimu sebenarnya”

(One Piece)

“Jika anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu.
Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.”

(JD Houston)

“Seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika anda lelah,
Anda akan berhenti ketika gorila tersebut terasa lelah.”

(Robert Strauss)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Firdausi Halimi

NIM : 140810101061

Menyatakan dengan sesungguhnya-benar-benar bahwa skripsi yang berjudul “Determinan Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017” ini benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya hasil plagiat. Saya bertanggung jawab atas segala keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Maret 2020

Yang menyatakan,

Achmad Firdausi Halimi
NIM 140810101061

SKRIPSI

**DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERDIDIK DI PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2013-2017**

Oleh :

Achmad Firdausi Halimi

NIM 140810101061

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si.

Dosen Pembimbing II : Dr. Zainuri, M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Determinan Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi
Jawa Timur Tahun 2013-2017

Nama Mahasiswa : Achmad Firdausi Halimi

NIM : 140810101061

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 3 Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si.
NIP. 197106102001122002

Dr. Zainuri, M.Si.
NIP. 196403251989021001

Mengetahui,

Ketua Koordinator Program Studi

Ekonomi Pembangunan

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.
NIP. 197207131999031001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERDIDIK DI PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2013-2017**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Achmad Firdausi Halimi
NIM : 140810101061
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal:

23 April 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dra. Nanik Istiyani, M.Si (.....)
NIP. 196101221987022002
2. Sekretaris : Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes. (.....)
NIP. 196411081989022001
3. Anggota : Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E., M.E. (.....)
NIP. 197804142001122003

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. CA.
NIP. 197107271995121001

Determinan Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Achmad Firdausi Halimi

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendidikan, UMK, PDRB dan Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terdidik. Sedangkan variabel independennya adalah Pendidikan, UMK, PDRB dan Inflasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif. Data yang digunakan adalah data time series 2013-2017 dan cross section 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan model *Random Effect* yang merupakan metode terbaik dalam mengolah data panel dalam penelitian ini. Hasil analisis dengan menggunakan data panel ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik, PDRB dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik, sedangkan UMK berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik.

Kata Kunci : tingkat pengangguran terdidik, pendidikan, upah minimum kabupaten, produk domestik regional bruto, inflasi.

Determinant of the Educated Unemployment Rate In East Java Province 2013-2017

Achmad Firdausi Halimi

*Departement of Economic and Development Study,
Faculty of Economic and Business,
University of Jember*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Education, Regency/city Minimum Wage (MSE), GRDP and Inflation on the level of Educated Unemployment in East Java Province in 2013-2017. The dependent variable in this study is the Educated Unemployment Rate. While the independent variables are Education, Regency/city Minimum Wage (MSE), GRDP and Inflation. The type of data used in this study is secondary data in the form of quantitative data. The data used are time series data 2013-2017 and cross section 38 districts / cities in East Java. Secondary data was sourced from the statistical center of the East Java. The analytical method used in this study is panel data analysis with the Random Effect model which is the best method in processing panel data in this study. The results of the analysis using panel data show that Education has a positive and significant effect on influencing on the level of educated unemployment, GRDP and Inflation have a negative and significant effect on the level of educated unemployment, while Regency/city Minimum Wage (MSE) has a positive and not significant effect on influencing the level of educated unemployment.

Keyword : *Educated Unemployment Rate, Education, GRDP, Regency/city Minimum Wage (MSE), Inflation.*

RINGKASAN

Determinan Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Timur;
Achmad Firdausi Halimi 140810101061; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Pengangguran merupakan masalah ekonomi dan sosial, sebagai masalah ekonomi angka pengangguran yang tinggi dapat membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran tersebut. Pengangguran juga dapat menimbulkan masalah sosial karena dapat mengakibatkan penderitaan yang besar untuk masyarakat yang menganggur yang berjuang dengan pendapatan yang berkurang dan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, karena angka pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan angka kriminalitas meningkat.

Pengangguran di Negara-Negara sedang berkembang pada umumnya didominasi oleh pengangguran usia muda dan berpendidikan. Salah satu karakteristik dari pengangguran di Indonesia khususnya di Jawa timur adalah tingginya pengangguran dengan pendidikan tinggi atau disebut dengan pengangguran terdidik. Sedangkan jumlah pengangguran sarjana meningkat dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya.

Teori *Human Capital* menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, disatu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Berdasarkan Teori *Human Capital* tersebut bahwasannya seharusnya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka semakin baik kualitas dan kemampuan kerja yang dimiliki oleh orang tersebut, dan seharusnya tidak menjadi pengangguran. Bahkan ia akan mendapatkan upah diatas upah minimum sebagai ganti dari pengorbanan biaya, tenaga, dan waktu untuk menempuh pendidikan yang sudah ia jalani. Akan tetapi hal ini berbeda dengan fenomena yang terjadi di Jawa Timur, dimana pengangguran masih cukup tinggi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1, padahal upah minimum yang ditetapkan pada provinsi Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tingkat upah merupakan hal yang mendasar dalam ketenagakerjaan dan mempengaruhi perekonomian provinsi Jawa Timur, dimana kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Tingkat upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya pengangguran.

Hal ini sesuai dengan *Kurva Philips* yang menyatakan adanya hubungan yang negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran pada ketika tingkat pengangguran tinggi, persentasi kenaikan tingkat upah adalah rendah dan apabila tingkat pengangguran rendah, persentasi kenaikan tingkat upah adalah tinggi. Selain itu *teori Philips* dalam Amir (2007:136) selain adanya hubungan antara tingkat upah dan pengangguran *teori Philips* juga mengatakan bahwa inflasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pengangguran. Hubungan antara inflasi dan pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat, inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor permintaan agregat adalah inflasi dari sisi permintaan (*demand side inflation*), sehingga inflasi ini akan menciptakan kelebihan permintaan (*excess demand*), yang merupakan inflationary gap dan dapat menekan harga untuk naik. Peningkatan permintaan agregat pada situasi produksi telah mencapai kapasitas penuh (*full employment*) dan akan menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan pada pasar barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa akan meningkat.

Salah satu indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk termasuk pengangguran yaitu pertumbuhan ekonomi yang merupakan peningkatan GDP. GDP itu sendiri adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam sesuatu negara (Sukirno, 1994). Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di negara tersebut, karena dengan kenaikan pendapatan nasional melalui GDP kemungkinan

dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan GDP suatu negara dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran di suatu negara (Mankiw, 2000: 67). Sementara untuk suatu wilayah, GDP tersebut dicerminkan dalam tingkat PDRB yang merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Dalam realitanya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Peningkatan output tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan model *Random Effect* yang merupakan metode terbaik dalam mengolah data panel dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai F-hitung sebesar 36.30384 dengan probabilitas F sebesar 0.000000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga secara statistik model estimasi *Random effect* dapat disimpulkan bahwa variabel Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik. Kemudian berdasarkan uji tabel multikolinieritas tidak terdapat gejala multikolinieritas karena semua nilai koefisien korelasi kurang dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji *Glejser* dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi masing-masing lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model tersebut. Berdasarkan hasil uji normalitas yang menggunakan uji *Jarque-Bera Test* diperoleh probabilitas sebesar 0.111872. Angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

PRAKATA

Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dari karunia-Nya, skripsi yang berjudul “*Determinan Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017*” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S₁) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Zainuri, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan pengarahannya atas skripsi ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Ibu. Dr. Riniati, M.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Moh. Adenan, M.M. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing selama perkuliahan dari semester awal sampai akhir.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan dari semester awal sampai akhir.
6. Seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Baihaki dan Ibunda (Almh) Siti Aminah atas doa dan dukungannya yang selalu sabar memberikan semangat dan perhatian yang tak terhingga.
8. Guru-guru saya mulai dari TK hingga SMA yang selalu mendidik, menginspirasi, memberi dukungan, nasehat, kesabaran, serta motivasi yang sangat bermanfaat.

9. Teman-teman kampus, terutama Noval, Beni, Hambali, Wendi, Burhan, Bagus, Galang yang menemani dan memberi bantuan dalam penyelesaian tugas akhir.
10. Teman-teman seperjuangan IESP angkatan 2014 lainnya yang memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman KKN UMD 49, Agus, Rafli, Anjas, Gufron, Anis, Endah, Rima, Nanda, dan Nurul yang selalu memberikan dukungan dan doa.
12. Teman-teman seperjuangan se-Universitas Jember.
13. Saudara-saudara saya di lingkungan Jember yang selalu mendoakan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua. Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini telah dibuat semaksimal mungkin dan penulis mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun pasti akan penulis hargai demi penyempurnaan penulisan yang lebih baik di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan yang bernilai positif bagi semua pihak.

Jember, 3 Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

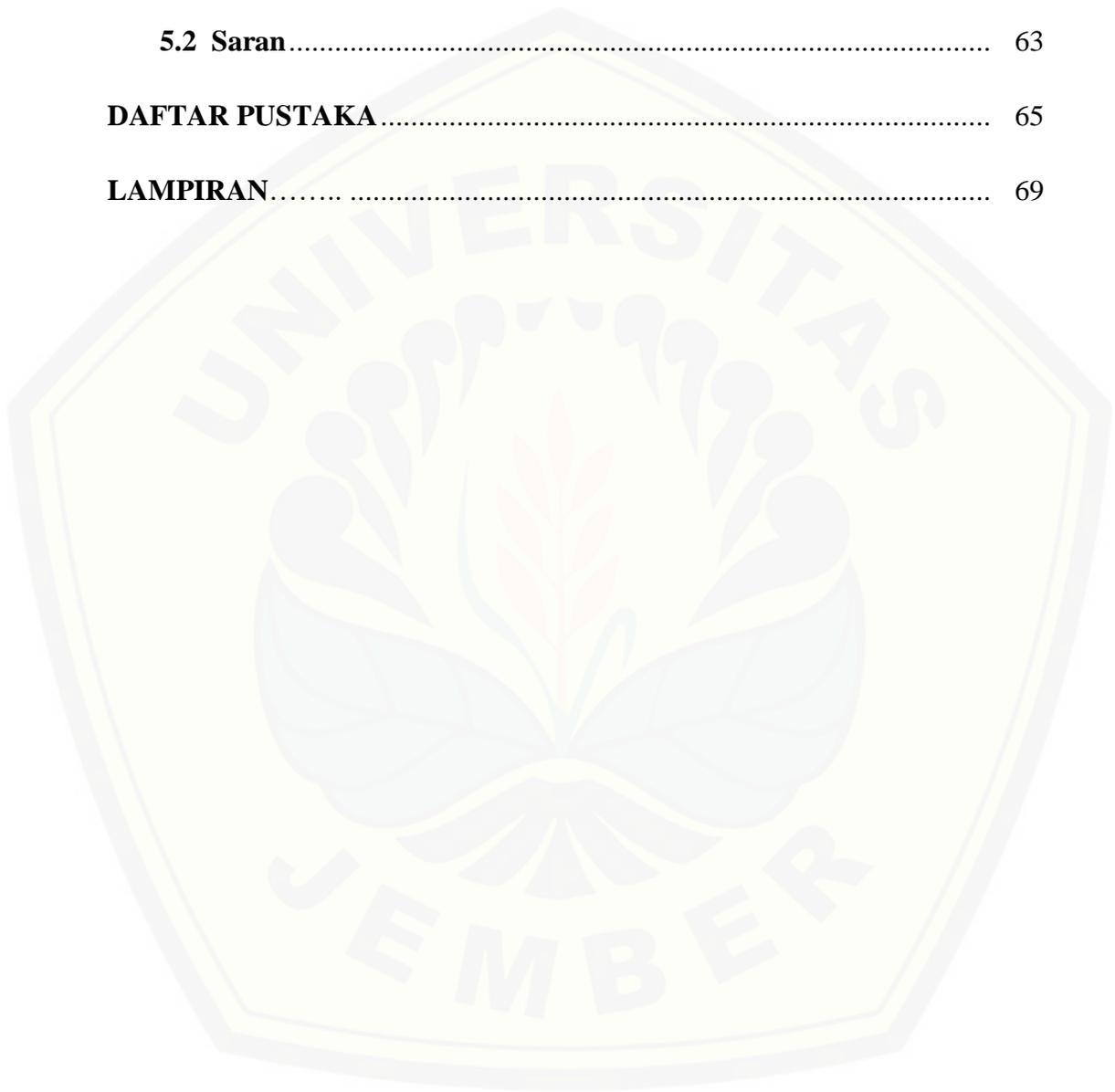
	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1. Teori Keynesian	9
2.1.2 Pengangguran.....	11
2.1.2.1 Pengangguran Terdidik	13
2.1.3 Pendidikan.....	13
2.1.3.1 Teori Human Capital.....	14
2.1.4 Upah	15
2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto	16
2.1.6 Inflasi	17
2.1.7 Hubungan Pendidikan Terhadap Pengangguran Terdidik	19
2.1.8 Hubungan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik	20
2.1.9 Hubungan PDRB Terhadap Pengangguran Terdidik	21
2.1.10 Hubungan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik	22
2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	23
2.3 Kerangka Konseptual	27
2.4 Hipotesis	29
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Rancangan Penelitian.....	30
3.1.1 Jenis Penelitian.....	30

3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.1.3 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.2 Metode Analisis Data	30
3.2.1 Analisis Regresi Data Panel	30
3.2.2 Uji Spesifikasi Model	32
3.2.2.1 Uji Chow	32
3.2.2.2 Uji Hausman.....	32
3.2.2 Uji Statistik	32
3.2.2.1 Uji F.....	32
3.2.2.2 Uji t	33
3.2.2.3 Koefisiensi Determinasi (Uji R^2).....	34
3.2.3 Uji Asumsi Klasik	34
3.2.3.1 Uji Multikolinearitas.....	34
3.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas.....	35
3.2.3.3 Uji Normalitas	35
3.3 Definisi Variabel Operasional.....	35
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum	38
4.1.1 Keadaan Geografis	38
4.1.2 Tingkat Pengangguran Terdidik di Jawa Timur.....	39
4.1.3 Pendidikan di Jawa Timur.....	42

4.1.4	UMK di Jawa Timur	44
4.1.5	PDRB di Jawa Timur	46
4.1.6	Inflasi di Jawa Timur	48
4.2	Hasil Analisis Data	50
4.2.1	Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel	51
4.2.1.1	Uji Chow	51
4.2.1.2	Uji Hausman	51
4.2.2	Analisis Regresi data Panel	52
4.3	Hasil Uji Statistik	53
4.3.1	Uji F (Uji Simultan)	53
4.3.2	Uji t (Uji Parsial)	53
4.3.3	Koefisiensi Determinasi (R^2)	54
4.4	Hasil Uji Asumsi Klasik	55
4.4.1	Uji Multikolinearitas	55
4.4.2	Uji Heteroskedastisitas	56
4.4.3	Uji Normalitas	56
4.5	Pembahasan	57
4.5.1	Pengaruh Pendidikan Terhadap TPT di Jawa Timur	57
4.5.2	Pengaruh UMK Terhadap TPT di Jawa Timur	58
4.5.3	Pengaruh PDRB Terhadap TPT di Jawa Timur	59
4.5.4	Pengaruh Inflasi Terhadap TPT di Jawa Timur	60

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tingkat Pengangguran di Negara-Negara Asean 2013-2017	1
1.2 Tingkat Pengangguran di Pulau Jawa tahun 2013-2017	2
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	25
4.1 Tingkat Pengangguran Terdidik di Jawa Timur tahun 2013-2017	41
4.2 Persentase Kualitas Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2013-2017	43
4.3 UMK 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017	45
4.4 PDRB 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017	47
4.5 Inflasi 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017	49
4.6 Hasil Statistik Deskriptif	50
4.7 Hasil Uji Chow	51
4.8 Hasil Uji Hausman	51
4.9 Hasil Estimasi Model	52
4.10 Hasil Uji R^2	55
4.13 Hasil Uji Multikolinearitas	55
4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Tingkat Pengangguran Terdidik di Jawa Timur 2013-2017.....	3
2.1 Kurva Hukum Okun.....	21
2.2 Kurva Philips	22
2.3 Kerangka Konseptual	28
4.1 Peta Provinsi Jawa Timur	38
4.2 Hasil Uji Normalitas	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Data Asli.....	69
Lampiran 2: Data Analisis.....	74
Lampiran 3: Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel	79
Lampiran 4: Hasil Uji Asumsi Klasik.....	80
Lampiran 5: Hasil Estimasi Model Regresi <i>Random Effect</i>	81

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Besarnya proporsi penduduk usia produktif adalah salah satu keuntungan yang bisa didapat dari banyaknya jumlah penduduk. Namun jumlah penduduk yang banyak tidak hanya membuat suatu keuntungan. Adapun masalah yang dihadapi dengan ledakan penduduk yang tinggi yakni permasalahan pengangguran. Pertumbuhan penduduk yang tinggi harus sejalan dengan ketersediaannya lapangan pekerjaan yang memadai agar tidak menimbulkan pengangguran (Desi, 2017).

Pengangguran merupakan masalah sosial dan ekonomi, pengangguran dapat menimbulkan masalah sosial karena dapat mengakibatkan penderitaan yang besar untuk masyarakat yang menganggur yang berjuang dengan pendapatan yang berkurang dan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, karena angka pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan angka kriminalitas meningkat. Sebagai masalah ekonomi angka pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat sehingga akan menurunkan tingkat investasi. Pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi daripada negara-negara asean lain, hal ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja (Samuelsen, 2010:363-365). Berikut merupakan data Tingkat Pengangguran di Negara-Negara Asean (dalam persen) Tahun 2013-2017:

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran di Negara-Negara Asean (dalam persen)

No	Nama Negara	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Indonesia	6,1	6,2	5,9	6,1	6,4
2	Malaysia	3	3,1	2,9	3	2,9
3	Singapura	2,2	2	2	1,9	2
4	Vietnam	4,3	4,5	2,7	2,8	2,5
5	Thailand	8,6	7,8	8	8	7,9
6	Filipina	7,3	7	7	7,1	6,8

(Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2019).

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia selama lima tahun terakhir selalu mengalami fluktuasi dari tahun ketahun, akan tetapi tingkat pengangguran di Indonesia masih diatas 5 persen. Hal ini berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam yang tingkat pengangguran di negara tersebut dari lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan dan tingkat pengangguran di bawah 5 persen. Indonesia hendaknya dapat mencontoh keberhasilan negara tetangga dalam menekan tingkat pertumbuhan pengangguran, apabila jika dilihat dari sumber daya alam dan manusia yang dimiliki tidak kalah dari negara-negara asean lainnya.

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, menurut data dari Badan Pusat Statistik kepadatan penduduk di Indonesia di dominasi oleh provinsi-provinsi di pulau Jawa. Kenaikan kepadatan penduduk mengakibatkan meningkatnya tenaga kerja dan apabila tidak diikuti dengan ketersediannya lapangan pekerjaan akan mengakibatkan tidak terserapnya tenaga kerja hingga akhirnya pengangguran meningkat. Berikut merupakan data dari pengangguran di pulau Jawa tahun 2016-2017.

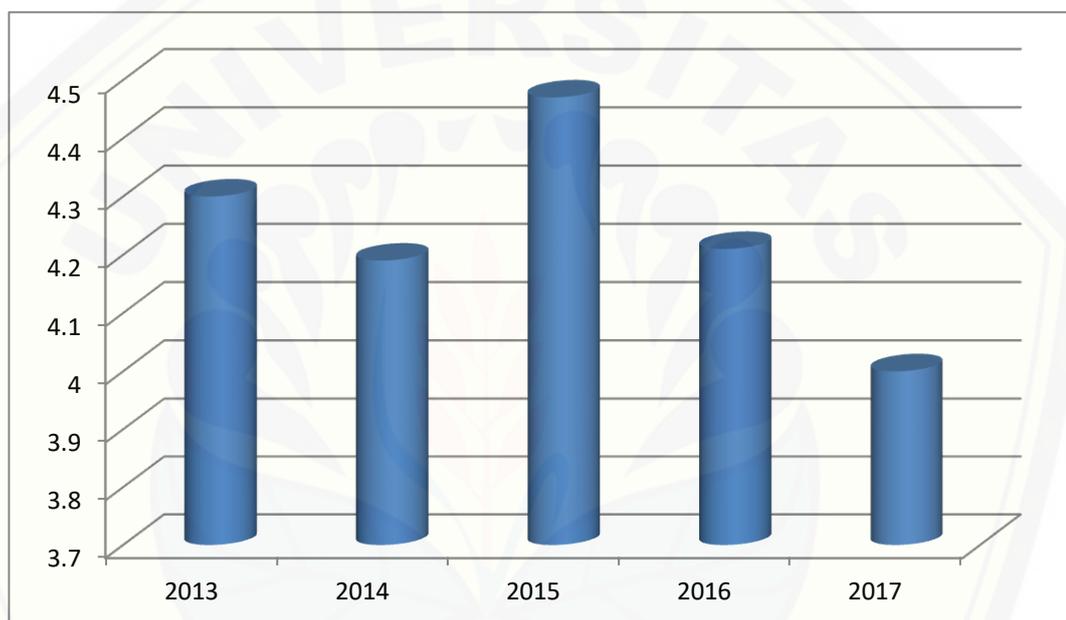
Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran di Pulau Jawa (dalam persen)

No	Provinsi	Tahun	
		2016	2017
1	DKI Jakarta	7,23	6,12
2	Jawa Barat	8,72	8,89
3	Jawa Tengah	4,99	4,63
4	DI Yogyakarta	4,07	2,72
5	Jawa Timur	4,47	4,21

(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2019)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa provinsi di Pulau Jawa selain Jawa Barat mengalami penurunan di tahun 2016-2017. Penurunan tingkat pengangguran yang paling signifikan terjadi di provinsi DI Yogyakarta, jika dilihat dari data diatas Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang penurunan tingkat penganggurannya paling rendah. Provinsi Jawa Timur yang tingkat penurunannya paling rendah mengindikasi bahwa adanya kegagalan dalam suatu pembangunan.

Todaro dan Smith (2010:249) berpendapat bahwa pengangguran pada umumnya didominasi oleh pengangguran usia muda dan berpendidikan. Salah satu karakteristik dari pengangguran di Indonesia khususnya di Jawa Timur adalah tingginya pengangguran dengan pendidikan tinggi atau disebut dengan pengangguran terdidik. Sedangkan jumlah pengangguran sarjana meningkat dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya. Berikut merupakan Gambar Tingkat Pengangguran Terdidik di Jawa Timur:



Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terdidik di Jawa Timur.

(Sumber: Badan Pusat Statistik 2018)

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2017. Ayu Isnaini (2017) mengatakan bahwa penyebab terjadinya pengangguran di Jawa Timur disebabkan oleh tiga faktor. Ketiga faktor tersebut meliputi keterbatasan lapangan pekerjaan, orientasi menjadi pegawai dan rendahnya mutu pendidikan sekolah tinggi yang ada di Jawa Timur.

Teori *Human Capital* menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat

penghasilan seseorang (Sumarsono, 2009:93). Berdasarkan Teori *Human Capital* tersebut seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka semakin baik kualitas dan kemampuan kerja yang dimiliki oleh orang tersebut dan seharusnya tidak menjadi pengangguran. Bahkan ia akan mendapatkan upah diatas upah minimum sebagai ganti dari pengorbanan biaya, tenaga, dan waktu untuk menempuh pendidikan yang sudah ia jalani. Akan tetapi hal ini berbeda dengan fenomena yang terjadi di Jawa Timur, dimana pengangguran masih cukup tinggi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1, padahal upah minimum yang ditetapkan pada provinsi Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tingkat upah merupakan hal yang mendasar dalam ketenagakerjaan dan mempengaruhi perekonomian provinsi Jawa Timur, dimana kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Tingkat upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya pengangguran.

Peningkatan tingkat upah di setiap wilayah atau daerah memiliki perbedaan tingkat upah. Wilayah yang mempunyai pendapatan daerah yang tinggi tentu akan menciptakan efek pendapatan bagi tenaga kerja karena banyaknya perusahaan yang berkembang di daerah tersebut. Tingkat upah dari setiap tenaga kerja selalu berbeda. Suatu kunci terhadap perbedaan tingkat upah terletak pada kualitas yang sangat berbeda diantara tenaga kerja. Penyebab yang paling berpengaruh yaitu tamatan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman seseorang setiap orang berbeda dalam kemampuan dan kontribusinya bagi pendapatan yang diterimanya. Semakin tinggi kualitas seseorang maka akan semakin besar kontribusinya bagi perusahaan, sehingga upah yang diterima juga semakin besar. (Sumarsono, 2009:201) berpendapat bahwa kenaikan upah minimum tidak dinikmati oleh pekerja terdidik karena perusahaan cenderung melakukan substitusi antar tenaga kerja dengan mesin. Sehingga seharusnya kenaikan upah minimum

justru akan menurunkan pengangguran, karena standar upah yang tinggi, perusahaan lebih memilih mesin untuk menjadi bagian dalam perusahaannya yang akan sebanding dengan apa yang telah perusahaan bayarkan.

Hasil penelitian dari Mochammad (2018) menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Jawa Timur. Artinya apabila upah minimum meningkat maka jumlah pengangguran akan menurun. Hal ini sesuai dengan *Kurva Philips* yang menyatakan adanya hubungan yang negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran pada ketika tingkat pengangguran tinggi, persentasi kenaikan tingkat upah adalah rendah dan apabila tingkat pengangguran rendah, persentasi kenaikan tingkat upah adalah tinggi. Selain itu *teori Philips* dalam Amir (2007:136) selain adanya hubungan antara tingkat upah dan pengangguran *teori Philips* juga mengatakan bahwa inflasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pengangguran. Hubungan antara inflasi dan pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat, inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor permintaan agregat adalah inflasi dari sisi permintaan (*demand side inflation*), sehingga inflasi ini akan menciptakan kelebihan permintaan (*excess demand*), yang merupakan inflationary gap dan dapat menekan harga untuk naik. Peningkatan permintaan agregat pada situasi produksi telah mencapai kapasitas penuh (*full employment*) dan akan menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan pada pasar barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa akan meningkat.

Salah satu indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk termasuk pengangguran yaitu pertumbuhan ekonomi yang merupakan peningkatan GDP. GDP itu sendiri adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam sesuatu negara (Sukirno, 1994). Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di negara tersebut, karena dengan kenaikan pendapatan nasional melalui GDP kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan GDP suatu negara dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah

pengangguran di suatu negara (Mankiw, 2000: 67). Sementara untuk suatu wilayah, GDP tersebut dicerminkan dalam tingkat PDRB yang merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Dalam realitanya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Peningkatan output tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Penelitian Anggun (2012) menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan yang positif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat, begitu juga pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat, yang artinya perubahan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi mengakibatkan berubahnya tingkat pengangguran terdidik, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjamin tingkat pengangguran terdidik berkurang. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukirno (2004:84) yang menyatakan bahwa semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, maka akan mengurangi jumlah pengangguran terdidik karena pertumbuhan ekonomi tersebut lebih berorientasi pada padat karya sehingga memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja, yang berarti proses produksi lebih mengandalkan tenaga kerja manusia daripada tenaga kerja mesin atau teknologi canggih.

Pengangguran merupakan isu penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur yang dalam tiga tahun terakhir penurunan tingkat penganggurannya tidak begitu signifikan. Beberapa indikator ekonomi yang dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengangguran diantaranya yaitu tingkat inflasi yang terjadi, tingkat upah dan besarnya pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB. Apabila suatu daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah pengeluaran agregat. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah kegunaan tenaga kerja. Oleh karena itu terdapat hubungan yang erat di antara

tingkat pendapatan nasional yang di capai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian Sukirno (2000:58). Berdasarkan fenomena, teori-teori dan studi empiris tersebut, penelitian ini ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diterangkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur?
4. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten terhadap tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto terhadap tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan khususnya yang berkaitan dengan tingkat pengangguran berdasarkan teori Hukum Okun, Kurva Phillips dan Human Capital.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan variabel-variabel yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur maupun area yang lebih luas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah di Indonesia khususnya di provinsi Jawa Timur, yaitu sebagai gambaran tentang pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum kabupaten, produk domestik regional bruto dan inflasi yang ada di Jawa Timur dan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya tentang tingkat pengangguran terdidik yang ada di Jawa Timur.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keynesian

John Maynard Keynes (1936) mengemukakan pemikiran yang kemudian dikenal dalam teori ekonomi makro sebagai Keynesian Revolution (Revolusi Keynesian). *Teori Keynes* difokuskan atas permintaan agregat yang efektif di dalam negeri sebagai variabel strategis dalam mengatasi stagnasi faktor-faktor produksi. Permintaan agregat efektif di dalam negeri membentuk pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk investasi, dan pengeluaran pemerintah untuk menimbulkan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. *Teori Keynes* dilatarbelakangi oleh situasi depresi pada tahun 1929/1930 sehingga dianggap relevan untuk tujuan stabilisasi jangka pendek dan bukan untuk memecahkan persoalan jangka panjang dalam pembangunan (Arif, 1998: 28).

Keynes membuat pernyataannya yang sangat revolusioner dalam ekonomi makro. Argumentasi Keynes yang esensial dibangun berdasarkan observasi berikut ini. Observasi pertama yaitu, pasar dalam tatanan ekonomi modern dapat terjebak dalam ekuilibrium kekurangan pekerjaan (underemployment equilibrium). Underemployment equilibrium menunjukkan keseimbangan persediaan dan permintaan agregat tenaga kerja yang produksinya jauh di bawah angkatan kerja potensial, dan sebagian lainnya (di luar kemauannya) tidak mendapatkan pekerjaan. Observasi Keynes yang kedua mengikuti observasinya yang pertama, yaitu melalui kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah dapat menstimulus ekonomi dan membantu menjaga produksi dan pekerjaan setinggitingginya. Sebagai contoh, jika pemerintah meningkatkan pembelian maka agregat permintaan akan meningkat pula (Samuelson, 1998: 315-316). Kerangka analisis Keynes kemudian mempengaruhi teori pertumbuhan yang dikembangkan sejak Perang Dunia II. Kerangka pemikiran Keynes yang menjadi formula bagi pembentukan teorinya kemudian disebut Neo-Keynes. Roy Harrod (1948) dan Evsey Domar (1957) menggunakan pemikiran Keynes untuk memformulasikan

proses pembangunan jangka panjang dengan mengemukakan teori mengenai hubungan antara tingkat tabungan dan tingkat investasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pola pendekatan Harrod terhadap proses pertumbuhan jelas menunjukkan ciri-ciri pokok pada kerangka analisis Keynes, baik dalam konseptualisasinya maupun perincian modelnya. Perhatian Keynes berkisar pada tingkat pendapatan yang stabil, berdasarkan kesempatan kerja secara penuh, termasuk penggunaan kapasitas produksi yang terpasang. Kini oleh Harrod dipersoalkan, dalam kondisi yang bagaimana dapat dicapai kestabilan pendapatan dan kesempatan kerja secara penuh dan yang dapat dipertahankan seterusnya dalam dinamika perkembangan ekonomi (perekonomian dalam perkembangan yang dinamis). Dengan kata lain, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan persyaratan apa terdapat suatu proses pertumbuhan yang berlangsung dalam ekuilibrium yang stabil (equilibrium of a steady advance). Perhatian Harrod dipusatkan pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk memelihara ekuilibrium antara tabungan–investasi–pendapatan dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Analisis Harrod dalam bentuk formalnya disusun dalam suatu kerangka agregatif. Dalam teori dinamikanya, dipaparkan asas fundamental yang menyangkut faktor dinamika (fundamental dynamic principle).

Selanjutnya, dalam banyak hal, telah menjadi lazim untuk menganggap teori Harrod dan gagasan yang dibebankan oleh Evsey Domar sebagai satu kelompok analisis. Bahkan ada kecenderungan untuk mengadakan perpaduan di antara dua model yang bersangkutan sebagai model Harrod-Domar. Teori Harrod menekankan bahwa pada proses pertumbuhan melekat suatu faktor ketidakstabilan yang menjadi gangguan terhadap kondisi ekuilibrium. Hal itu lazim disebut instability theorem sebagai ciri pokok gagasan Harrod. Konsekuensi dari instability theorem ini adalah diperlukannya langkah-langkah kebijaksanaan tertentu untuk menanggulangi ketidakstabilan guna menjaga pertumbuhan yang berdasarkan ekuilibrium yang stabil. Gagasan Domar berpangkal tolak pada berlakunya asas investment multiplier. Laju pertumbuhan pada permintaan efektif langsung dihadapkan kepada pertumbuhan pada kapasitas produksi. Teori Harrod-Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya

tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut akan rendah.

Kelebihan dari teori Keynes yang dikemukakan oleh Harrod-Domar sebagai berikut :

- a. Mengatasi pengangguran inflasi dan ketidakmerataan pendapatan.

Teori ini berasumsi bahwa dalam suatu pasar tidak hanya swasta yang menguasai tapi juga memerlukan intervensi dari pemerintah untuk mengimbangi permasalahan yang muncul adalah adanya pengangguran, inflasi dan ketidakmerataan pendapatan.

- b. Peran pemerintah untuk menurunkan pajak.

Salah satu yang ditawarkan dalam teori Keynesian dalam penyelesaian masalah tersebut adalah peran pemerintah untuk menurunkan pajak untuk produsen sehingga menambah lapangan kerja dan memperkerjakan pengangguran lebih banyak.

- c. Adanya unsur pemerintah swasta.

Pemerintah dan swasta hubungannya baik maka permintaan agregatnya akan tinggi karena pasar tidak hanya dikuasai oleh swasta tetapi juga memerlukan investasi dari pemerintah untuk mengimbangi.

- d. Bersifat umum.

Teori ekonomi Keynes ini bersifat umum yang tidak hanya berlaku dalam satu tingkat employment Keynes tidak mempersoalkan sebuah persoalan individual atau suatu barang cabang perusahaan individual.

- e. Mengetahui gejala-gejala inflasi.

Teori ini mengikutsertakan peran pemerintah sehingga dapat mengetahui gejala-gejala inflasi.

2.1.2 Pengangguran

Pengangguran merupakan seseorang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak. Sukirno (2004:115) mengatakan bahwa pengangguran adalah seseorang yang sudah

digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, akan tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran seringkali menjadi masalah untuk perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Adapun jenis-jenis pengangguran menurut Case and Fair (2004:43-45) dalam bukunya Prinsip-prinsip Ekonomi Makro, pengangguran dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

a. Pengangguran Friksional (*frictional unemployment*)

Pengangguran Friksional adalah bagian pengangguran yang disebabkan oleh kerja normalnya pasar tenaga kerja. Jenis pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahnya orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain.

b. Pengangguran musiman (*seasonal unemployment*)

Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. Yang dimaksud dengan pengangguran musiman yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu didalam satu tahun.

c. Pengangguran siklis (*cyclical unemployment*)

Pengangguran siklis adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksinya. Dengan demikian, kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran.

d. Pengangguran struktural (*struktural unemployment*)

Dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan pengangguran struktural yaitu sebagai akibat dari kemerosotan permintaan atau sebagai akibat

dari semakin canggihnya teknik memproduksi. Faktor yang kedua memungkinkan suatu perusahaan menaikkan produksi dan pada waktu yang sama mengurangi pekerja.

2.1.2.1 Pengangguran Terdidik

Pengangguran terdidik didefinisikan sebagai rasio antara jumlah pencari kerja yang berpendidikan pada tingkat SLTA keatas terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok berdasarkan pendidikan yang ditamatkan (BPS, 2009). Pengangguran tenaga kerja terdidik umumnya identik pada golongan usia muda yang berpendidikan. Menurut (Mulyono, 1997) kelompok pengangguran terdidik kebanyakan merupakan tenaga kerja yang baru menyelesaikan pendidikan dan sedang menunggu untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan yang sesuai. Selama menunggu kesempatan pekerjaan yang sesuai, biaya kebutuhan hidup yang diperlukan dapat ditanggung oleh keluarga, sebab status sosial keluarganya relatif mampu (Tukiran, Kutaneegara, Pitoyo, & Latief, 2007). Terdapat beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran terdidik, yaitu:

Pertama, faktor struktural. Faktor ini merupakan faktor penyebab kurangnya keterampilan pada kelompok muda dibandingkan dengan kelompok yang lebih matang dan faktor usia ketika lulus kuliah.

Kedua, (Mulyono, 1997) berpendapat bahwa faktor penyebab non struktural yaitu adanya kenaikan upah buruh yang membuat perusahaan tidak menerima karyawan baru bahkan membuat perusahaan mem-PHK karyawannya. Intinya kecenderungan meningkatnya pengangguran terdidik sebagai akibat dari tingginya pendidikan seseorang maka semakin tinggi harapan seseorang untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sesuai.

2.1.3 Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan juga merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi (Desi, 2017).

a. Jalur Pendidikan

Jalur pendidikan di Indonesia menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terdiri dari:

1. *Pendidikan formal*, merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
2. *Pendidikan nonformal*, merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. *Pendidikan informal*, merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Ketiga jalur pendidikan ini dapat saling melengkapi dalam pembentukan kepribadian, pengetahuan, serta keterampilan seseorang.

b. Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Penjenjangan pendidikan tersebut dapat menunjukkan kualitas vertikal untuk mengetahui relevansi pendidikan terhadap pasar kerja. Kecocokan antara keterampilan yang dimiliki dengan tuntutan pekerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok dalam penanganan angkatan kerja.

2.1.3.1 Teori Human Capital

Pendidikan adalah salah satu termasuk dalam investasi pada bidang sumber daya manusia yang dinamakan dengan *Human Capital*. Menurut Billy (2016) mengatakan bahwa pendidikan merupakan bagian dari investasi, kegiatan yang dapat dinilai kualitas manusia, dimana nilai kualitas manusia setelah mengikuti diharapkan mampu meningkatkan berbagai bentuk nilai berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktivitas kerja, dan

peningkatan nilai rasional individu dibandingkan dengan sebelum mengikuti pendidikan.

Desi (2016) Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti dapat meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Selain itu, seseorang tersebut rela menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dikarenakan mengikuti sekolah tersebut. Di samping penundaan menerima penghasilan tersebut, seseorang yang melanjutkan pendidikan harus membayar biaya, seperti uang sekolah, buku, dan alat sekolah dan lain-lain.

Pendidikan merupakan suatu pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Apabila dunia pendidikan suatu bangsa sudah jeblok, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Sehingga, setiap bangsa yang ingin maju maka pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi prioritas utama.

2.1.4 Upah

Menurut Normalitasi (2012) upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja seseorang kepada penerima kerja atas pekerjaan atau jasa yang telah maupun yang akan dilakukan. Selanjutnya, upah juga berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dinyatakan serta dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa upah dapat diartikan sebagai pengganti atas jasa yang telah di berikan oleh tenaga kerja kepada sebuah perusahaan. Oleh karena itu dalam pemberian upah, perusahaan perlu memperhatikan prinsip adil dan layak. Yang dimaksud adil adalah bahwa besarnya upah harus dikaitkan dengan nilai relatif pekerjaan-pekerjaan. Adapun jenis-jenis upah menurut Normalitasi (2012) yaitu sebagai berikut:

a. Upah Nominal

Upah nominal merupakan sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja yang berhak sebagai imbalan dari jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

b. Upah Hidup

Upah hidup merupakan upah yang diterima oleh pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya.

c. Upah Minimum

Upah minimum merupakan upah yang terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya.

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi Harold-Domar merupakan perkembangan dari Teori Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Teori Harrod-Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut akan rendah. Produk Domestik Bruto ada tiga pendekatan menurut Robinson Tarigan (2005:67-69). yang cukup kerap digunakan dalam melakukan suatu penelitian :

1. Menurut pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, Produk Domestik Bruto adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

2. Menurut pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya.

3. Menurut pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor neto.

2.1.6 Inflasi

Menurut Sukirno (2012:15) inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.

Sedangkan menurut para ekonom lain berpendapat bahwa Inflasi adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dan persediannya, yaitu permintaan melebihi persediaan dan semakin besar perbedaan itu semakin besar bahaya yang ditimbulkan oleh inflasi bagi kesehatan ekonomi. Adapun inflasi berdasarkan parah tidaknya, inflasi dibedakan menjadi 4 macam diantaranya :

1. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun).
2. Inflasi sedang (antara 10 - 30% setahun).
3. Inflasi berat (antara 30 - 100% setahun).
4. Hiperinflasi (di atas 100% setahun).

Inflasi yang tinggi tidaklah baik karena sangat menyengsarakan masyarakat dalam suatu negara. Sebaliknya inflasi yang terlalu rendah juga sangat merugikan negara, maka dari itu kondisi inflasi yang wajarlah yang dapat memberikan keadaan positif bagi perekonomian suatu negara. Inflasi yang terjadi didalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak atau akibat yaitu sebagai berikut:

- a. Inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan *riil* satu orang meningkat, tetapi pendapatan *riil* orang lainnya jatuh.
- b. Inflasi dapat menyebabkan penurunan di dalam efisiensi ekonomi (*economic efficiency*).
- c. Inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan didalam output dan kesempatan kerja (*employment*).
- d. Inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil (*unsable environment*) bagi keputusan ekonomi.

Inflasi dilihat dari sebab awalnya :

1. *Demand-Pull Inflation*

Demand-pull Inflation disebabkan oleh permintaan masyarakat akan barang-barang (agregate demand) bertambah. Inflasi ini biasanya terjadi pada

masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Selain pada masa perekonomian berkembang pesat, *Demand-pull Inflation* juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus menerus. Dalam masa seperti ini pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. Maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi.

2. *Cost Push Inflation*

Inflasi *jenis Cost – Push inflation* terjadi karena kenaikan biaya produksi, yang disebabkan oleh terdepresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara- negara partner dagang, peningkatan harga – harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji atau upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

2.1.7 Hubungan Pendidikan terhadap Pengangguran Terdidik

Teori Human Capital berkaitan dengan pembentukan modal manusia, yaitu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman, yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan

sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan pendapat Soebagiyo (2005) bahwa pendidikan memang dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Apabila tidak mencerminkan kualitas yang baik maka sektor ini juga akan menyumbangkan proses terjadinya pengangguran. Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik menjadikan suatu masalah yang semakin serius.

Moelyono (1997) menyatakan bahwa kemungkinan hal ini disebabkan oleh makin tingginya tingkat pendidikan maka makin tinggi pula aspirasinya untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai dengan keinginannya, sehingga proses untuk mencari kerja lebih lama pada kelompok pencari kerja terdidik disebabkan tenaga kerja terdidik lebih banyak mengetahui perkembangan informasi di pasar kerja dan lebih berkemampuan untuk memilih pekerjaan yang diminati dan menolak pekerjaan yang tidak sesuai.

2.1.8 Hubungan Upah terhadap Pengangguran Terdidik

Kurva Phillips menggambarkan ciri perhubungan diantara tingkat kenaikan upah dengan tingkat pengangguran, atau di antara tingkat harga dengan tingkat pengangguran. Nama kurva tersebut diambil dari orang yang mula-mula sekali membuat studi dalam aspek tersebut. Dalam tahun 1958 A.W. Phillips, yang pada waktu itu menjadi Profesor di London School of Economics, menerbitkan satu studi mengenai ciri-ciri perubahan tingkat upah di Inggris. Studi tersebut meneliti sifat hubungan diantara tingkat pengangguran dan kenaikan tingkat upah. Pada pasar tenaga kerja, penurunan tingkat upah akan mengakibatkan peningkatan pengangguran, hal ini disebabkan karena adanya kelebihan penawaran tenaga kerja. Selain itu, tingkat upah juga akan mengalami peningkatan jika terjadi kelebihan permintaan tenaga kerja atau dengan kata lain jumlah pengangguran mengalami peningkatan dan jumlah pencarian kerja terus bertambah dan mengakibatkan penurunan tingkat upah. Sifat hubungan yang negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran pada ketika tingkat pengangguran tinggi, persentasi kenaikan tingkat upah adalah rendah dan

apabila tingkat pengangguran rendah, persentasi kenaikan tingkat upah adalah tinggi.

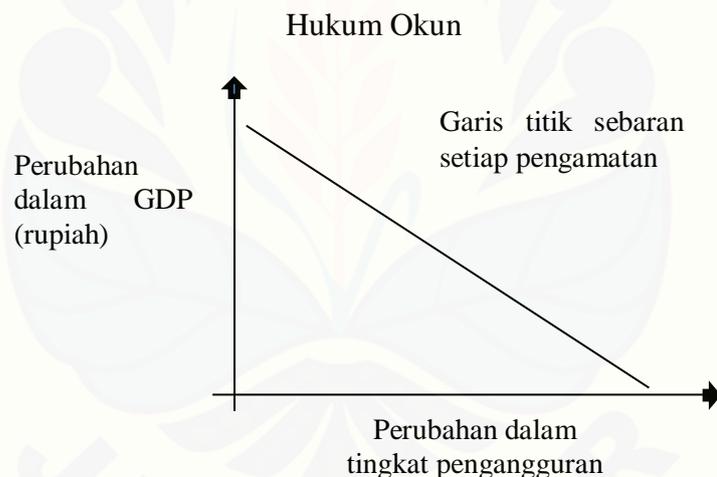
Pasar tenaga kerja didasarkan atas dua asumsi sebagai berikut :

3. Penawaran dan permintaan tenaga kerja akan menentukan tingkat upah.
4. Perubahan tingkat upah ditentukan oleh besarnya kelebihan permintaan tenaga kerja yang disebut Excess Demand.

2.1.9 Hubungan PDRB terhadap Pengangguran Terdidik

Hubungan antara tingkat PDRB yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran diungkapkan oleh George Mankiw. Hal ini didasarkan pada Hukum Okun, yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan besarnya PDRB suatu daerah.

Gambar 2.1 Kurva hubungan GDP dengan pengangguran



Sumber: Teori Makro Ekonomi, (Mankiw, 2000: 432)

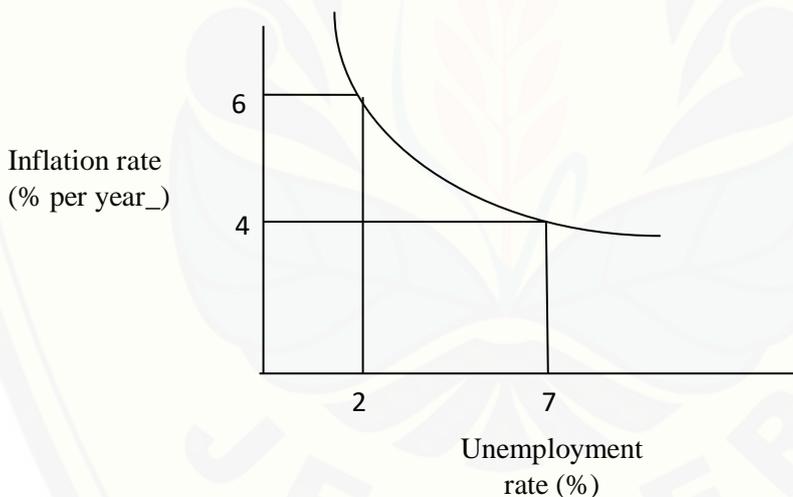
Hukum Okun yang menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dengan GDP riil, dimana terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan GDP. Pada kurva Okun terdapat garis sumbu horizontal yang menunjukkan perubahan tingkat pengangguran dan persentase GDP riil pada sumbu vertikal. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perubahan dalam tingkat pengangguran tahun ke tahun sangat erat hubungannya dengan perubahan dalam GDP riil tahun ke tahun. Setiap adanya peningkatan

terhadap persentase pengangguran dalam suatu daerah maka hal tersebut akan setara dengan terjadinya penurunan besarnya PDRB sebesar 2 persen. Apabila PDRB suatu daerah turun maka produksinya juga turun, artinya tingkat produksi yang ada di daerah tersebut turun diakibatkan oleh konsumsi yang turun dari masyarakat dan juga tenaga kerja yang digunakan juga akan turun, akibat dari berkurangnya produksi perusahaan.

2.1.10 Hubungan Inflasi terhadap Pengangguran Terdidik

Teori A.W. Phillips mengamati hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Dari hasil pengamatannya, ternyata ada hubungan yang erat antara inflasi dengan tingkat pengangguran, jika inflasi tinggi, pengangguran pun akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan *kurva Phillips*.

Gambar 2.2 Kurva Philips



Sumber : Amri Amir, 2007

Berdasarkan Gambar 2.2 Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat, inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor permintaan agregat adalah inflasi dari sisi permintaan (*demand side inflation*), sehingga inflasi ini akan menciptakan kelebihan permintaan (*excess demand*), yang merupakan inflationary gap dan dapat menekan harga untuk naik. Peningkatan permintaan agregat pada situasi

produksi telah mencapai kapasitas penuh (full employment) dan akan menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan pada pasar barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa akan meningkat.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

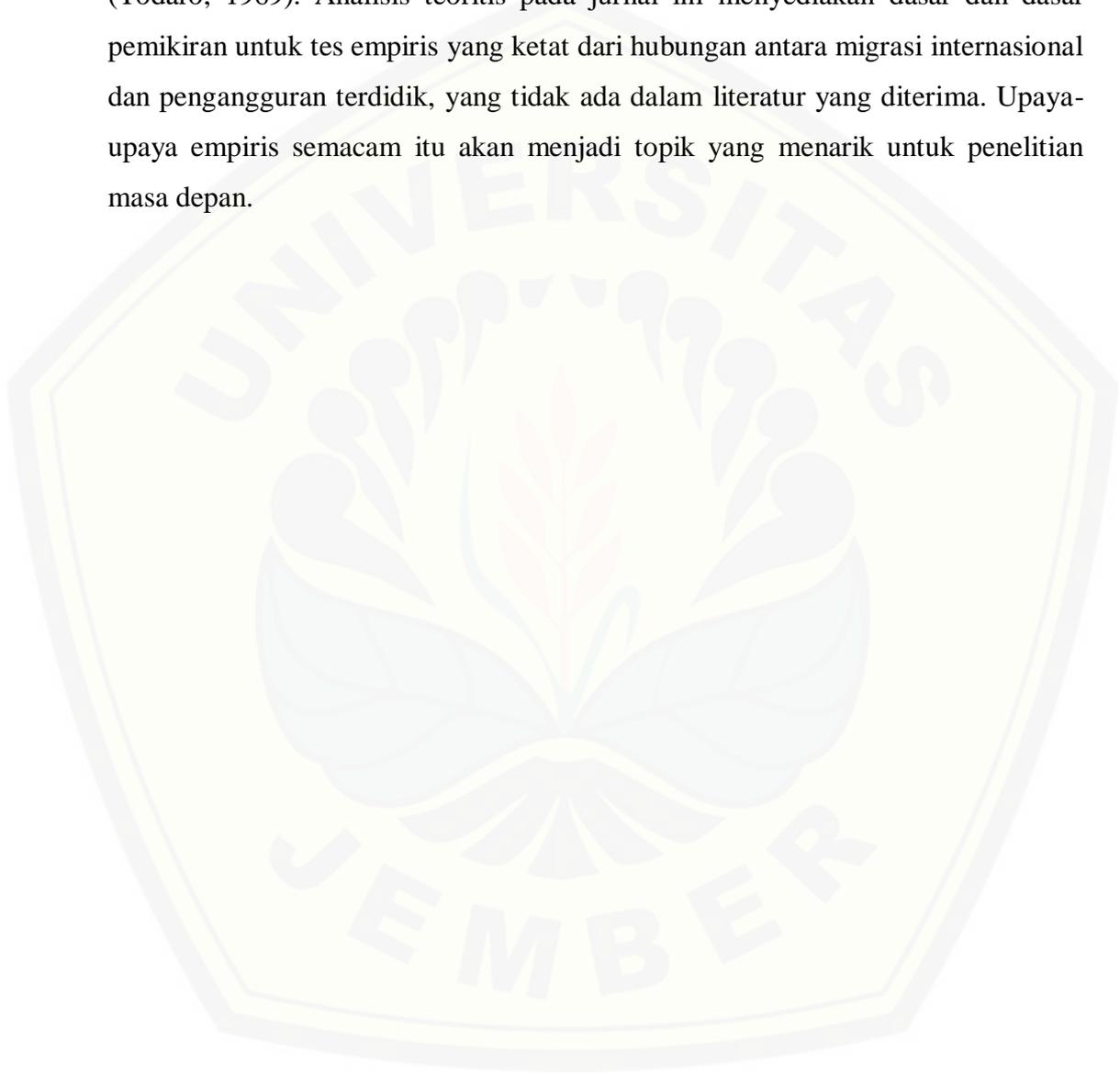
Penelitian dari Huda Mochammad (2017) tentang Determinan Pengangguran Terdidik Jawa Timur. Hasil dari analisis data yang sudah dilakukan dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini yaitu UMK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran Terdidik Jawa Timur. PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran Terdidik Jawa Timur. Dimana hasil Uji F menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kota (UMK), Usia Kerja (UK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pengangguran Terdidik Jawa Timur. Dan untuk Uji t menunjukkan secara Parsial variabel UMK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengangguran Terdidik. Secara Parsial variabel jumlah UMK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengangguran Terdidik. Secara Parsial variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik.

Susilawati (2013) mengenai Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi lama menganggur tenaga kerja terdidik di Kota Bengkulu (Studi Kasus di Kecamatan Ratu Agung) dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan Untuk pengujian secara individu atau parsial (Uji t) Variabel tingkat pendidikan (X1) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap lama menganggur tenaga kerja terdidik sektor formal Swasta di Kota Bengkulu, variabel jenis kelamin (X2) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap lama menganggur tenaga kerja terdidik sektor formal Swasta di Kota Bengkulu dan Variabel tingkat upah (X3) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap lama menganggur tenaga kerja terdidik sektor formal Swasta di Kota Bengkulu.

Jacob Mincer tentang Education And Unemployment. Di dalam jurnal ini menemukan bahwa pendidikan dapat mengurangi pengangguran, yaitu probabilitas mengalami pengangguran dalam kalender periode, jauh lebih penting

daripada berkurangnya durasi pengangguran dalam menciptakan pendidikan dalam tingkat pengangguran.

C. Simon Fan, Oded Stark dengan judul *International Migration and Education Unemployment*. Isi dari jurnal ini adalah sesuai dengan pendapat (Todaro, 1969). Analisis teoritis pada jurnal ini menyediakan dasar dan dasar pemikiran untuk tes empiris yang ketat dari hubungan antara migrasi internasional dan pengangguran terdidik, yang tidak ada dalam literatur yang diterima. Upaya-upaya empiris semacam itu akan menjadi topik yang menarik untuk penelitian masa depan.



Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Mochamad Miftahul Huda (2017)	Determinan Pengangguran Terdidik Jawa Timur	UMK (X1), Penduduk Usia Kerja (X2), PDRB (X3). Pengangguran Terdidik (Y)	Metode regresi Ordinary Least Square (OLS).	Hasil dari penelitian ini yaitu UMK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran Terdidik Jawa Timur. Penduduk Usia Kerja mempunyai pengaruh Positif dan signifikan terhadap Pengangguran Terdidik Jawa Timur. PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran Terdidik Jawa Timur.
2.	Syamsul Alam (2016)	Tingkat pendidikan dan pengangguran di Indonesia (Telaah Serapan Tenaga Kerja SMA/SMK dan Sarjana).	Pendidikan (X1), dan Pengangguran (Y).	Metode analisis deskriptif	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan terdapat beberapa alasan yang menjadi sebab utama mengapa ada begitu banyak sarjana pengangguran di Indonesia, diantaranya: 1. Dampak dari bangkrutnya perusahaan, banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. 2. Pengangguran harus di bawah 3%. Bukan berarti sebuah negara menjadi semakin bagus ketika tidak memiliki SDM yang menganggur. Justru hal ini sangat berbahaya karena perusahaan akan kesulitan menjadi SDM baru.
3.	Sri Maryati (2015)	Dinamika Pengangguran Terdidik Tantangan Menuju Bonus Demografi di Indonesia	Bonus demografi (jumlah penduduk produktif melebihi jumlah penduduk yang tidak dalam usia produktif) (X1) dan Pengangguran Terdidik.	Metode analisa deskriptif kualitatif berbasis kajian kepustakaan (library research).	Bonus Demografi dapat menjadi potensi ekonomi nasional, perlu dipersiapkan dan selanjutnya dimanfaatkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Syarat agar Bonus Demografi dapat dimanfaatkan dengan mempersiapkannya sejak tahap perencanaan sampai dengan implementasinya di lapangan.

- | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|--------------------------|
| 4. | Jacob Mincer
(2016) | Education And Unemployment | Education And
Unemployment | Analysis of Panel |
| 5. | C. Simon Fan,
Oded Stark
(2014) | International Migration and
Education Unemployment | International Migration and
Education Unemployment | Method of OLS estimation |

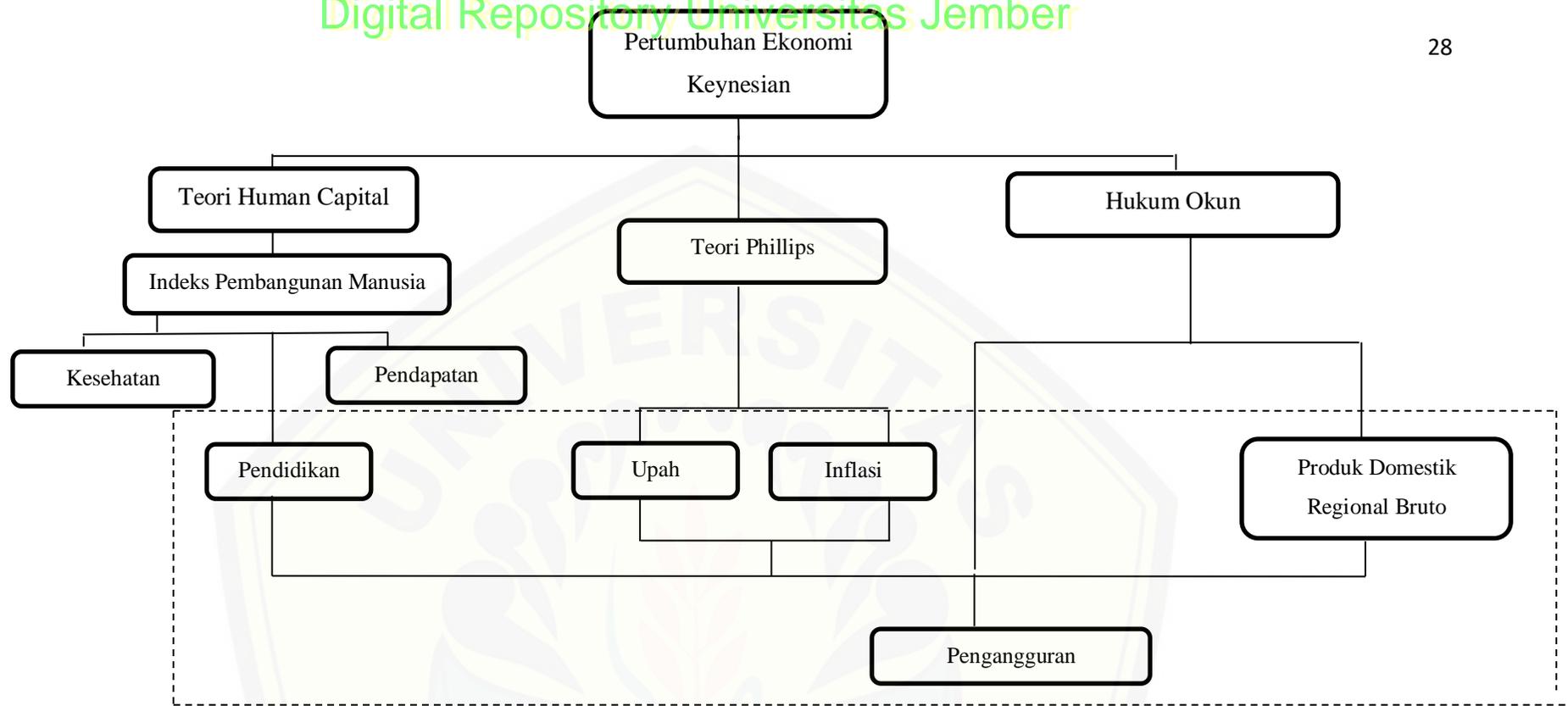
Jurnal ini mengemukakan bahwa pendidikan dapat mengurangi pengangguran, yaitu probabilitas mengalami pengangguran dalam kalender periode, jauh lebih penting daripada berkurangnya durasi pengangguran dalam menciptakan pendidikan dalam tingkat pengangguran

Analisis ini menunjukkan bahwa negara berkembang mungkin akan berakhir dengan individu yang lebih terdidik, meskipun brain drain dan pengangguran terdidik tidak dapat diperbaiki. Analisis teoritis pada jurnal ini menyediakan dasar dan dasar pemikiran untuk tes empiris yang ketat dari hubungan antara migrasi internasional dan pengangguran terdidik, yang tidak ada dalam literatur yang diterima. Upaya-upaya empiris semacam itu akan menjadi topik yang menarik untuk penelitian masa depan.

2.3 Kerangka Konseptual

Salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Keynesian ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut akan rendah. Investasi dapat dilakukan bukan saja pada fisik, tetapi juga pada bidang non fisik. Investasi fisik meliputi bangunan pabrik dan perumahan karyawan, mesin-mesin dan peralatan. Investasi non fisik meliputi pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kesehatan. Investasi non fisik lebih atau lebih dikenal dengan investasi sumber daya manusia adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi, hal ini juga disebut *Human Capital*. Investasi ini berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat terjadi akibat inflasi yang stabil, pengendalian inflasi menjadi sangat penting karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil menyebabkan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tidak stabil juga menyebabkan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan untuk konsumsi, investasi maupun produksi sehingga akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Inflasi memiliki hubungan negatif terhadap pengangguran sesuai dalam *kurva Phillips*. Selain itu *Kurva Phillips* juga menggambarkan ciri perhubungan yang negatif diantara tingkat kenaikan upah dengan tingkat pengangguran, atau di antara tingkat harga dengan tingkat pengangguran. Sifat hubungan yang negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran pada ketika tingkat pengangguran tinggi, persentasi kenaikan tingkat upah adalah rendah. Pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi menurunnya tingkat pengangguran. Hal ini dijelaskan di dalam hukum Okun dimana terdapat hubungan yang negatif antara PDB riil dan pengangguran (Lipsey, 1997:107). Maka untuk mengetahui kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Sumber : Berbagai literatur yang diolah peneliti

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian adalah:

- H_1 : Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur.
- H_2 : Upah minimum kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur
- H_3 : Produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur.
- H_4 : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah metode *explanatory research*, yaitu jenis penelitian yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan hubungan kausal atau ada tidaknya hubungan, pola hubungan dan besar hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan menurut tingkat penjelasannya, penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2009). Penelitian ini difokuskan untuk mencari pengaruh pendidikan, upah minimum kabupaten, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur pada tahun 2013-2017.

3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini yaitu di Jawa Timur dimana lingkup penelitiannya adalah untuk mengamati pengaruh pendidikan, upah minimum kabupaten, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur pada tahun 2013-2017.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif, sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2002). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013-2017 meliputi 38 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

3.2. Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Regresi Data Panel

Data panel adalah suatu data yang diperoleh dengan menggabungkan antara data *cross section* dan data *time series* yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel dalam penelitian ini (pendidikan, upah minimum

kabupaten, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur pada tahun 2013-2017).

Menurut (Gujarati, 2013) Terdapat beberapa kelebihan dalam menggunakan data panel, diantaranya sebagai berikut:

1. Data panel mampu menyediakan banyak data, sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap dan lebih banyak variasi.
2. Data panel meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregat individu, karena data yang diobservasi lebih banyak.
3. Dapat menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks, sebagai contoh: seperti fenomena perubahan teknologi dan skala ekonomi.
4. Teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas dalam setiap unit secara eksplisit dengan memberikan variabel spesifik subyek.

Menurut (Gujarati, 2013) mengingat data panel merupakan gabungan antara *time series* dan *cross section*, persamaan model yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{PEND} + \beta_2 \text{UMK} + \beta_3 \text{PDRB} + \beta_4 \text{INF} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Pengangguran Terdidik (persen)
X1	= Pendidikan (persen)
X2	= Upah Minimum Kabupaten (rupiah)
X3	= Produk Domestik Regional Bruto (myliar rupiah)
X4	= Inflasi (persen)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$	= Parameter
ε	= Error

Analisis regresi data panel memiliki empat model, antara lain: model OLS *pooled*, model *fixed effects*, model *random effects* dan model *fixed least square dummy variabel*. Sebelum menentukan dari empat model tersebut maka terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi model yang terdiri dari *fixed effect* atau *random effect*.

3.2.2 Uji Spesifikasi Model

Uji Spesifikasi model bertujuan untuk menentukan model analisis data panel yang paling tepat digunakan. Dalam menentukan model yang tepat dapat menggunakan beberapa pengujian yaitu:

3.2.2.1 Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan model mana yang sebaiknya dipakai dalam regresi data panel antara model tanpa pengaruh individu (*common effect*) dengan pengaruh individu (*fixed effect*). Dalam pengujian ini dilakukan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 = corr$ atau korelasi $(X_{it}, U_{it}) = 0$ *Common Effect*, yang artinya *Common Effect* lebih tepat digunakan daripada *Fixed Effect*.

$H_1 = corr$ atau korelasi $(X_{it}, U_{it}) \neq 0$ *Fixed Effect*, yang artinya *Fixed Effect* lebih tepat digunakan daripada *Common Effect*.

3.2.2.2 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui model yang paling tepat untuk digunakan antara model *fixed effect* atau model *random effect*. Pada model *fixed effect* setiap obyek memiliki intersep yang berbeda-beda, tetapi intersep masing-masing obyek tidak berubah seiring waktu. Hal ini disebut dengan *time-invariant*. Sedangkan pada model *random effect* intersep mewakili nilai rata-rata dari semua intersep (*cross section*) dan komponen mewakili deviasi (acak) dari intersep individual terhadap nilai rata-rata tersebut. Berikut merupakan hipotesis dalam uji Hausman:

$H_0 = corr$ atau korelasi $(X_{it}, U_{it}) = 0$ *Random Effect*, yang artinya *Random Effect* lebih tepat digunakan daripada *Fixed Effect*.

$H_1 = corr$ atau korelasi $(X_{it}, U_{it}) \neq 0$ *Fixed Effect*, yang artinya *Fixed Effect* lebih tepat digunakan daripada *Random Effect*.

3.2.3 Uji Statistik

3.2.3.1 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui variabel bebas (pendidikan, upah minimum kabupaten, produk domestik regional bruto dan inflasi) berpengaruh

secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur pada tahun 2013-2017. Rumus yang digunakan dalam uji F ini sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(K-1)}{(1-R^2)/(N-K)}$$

Keterangan:

F = pengujian secara bersama-sama

R^2 = koefisien determinasi berganda

k = banyaknya variabel

n = banyaknya sampel

$k - 1$ = derajat bebas pembilang

$n - 1$ = derajat bebas penyebut

Kriteria pengujian uji F sebagai berikut:

1. Jika probabilitas F-hitung < level signifikan ($\alpha = 5\%$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya bahwa seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika probabilitas F-hitung > level signifikan ($\alpha = 5\%$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya bahwa seluruh variabel bebas tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.2.3.2 Uji t

Analisis ini digunakan untuk membuktikan apakah pendidikan, upah minimum kabupaten, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur pada tahun 2013-2017 mengalami hubungan yang signifikan (Prayitno, 2010). Rumus yang digunakan dalam uji t ini sebagai berikut:

$$t = \frac{bi}{Se(bi)}$$

Keterangan:

t = test signifikansi dengan angka korelasi

bi = koefisien regresi

Se(bi) = standar error dari koefisien korelasi

Kriteria pengujian uji t sebagai berikut:

1. Jika probabilitas t-hitung $< (\alpha = 5\%)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika probabilitas t-hitung $> (\alpha = 5\%)$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya bahwa variabel bebas tidak berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat.

3.2.3.3 Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Koefisien determinasi berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh langsung variabel bebas yang semakin dekat hubungannya dengan variabel terikat, nilai (R^2) adalah antara angka nol dan satu. Dari koefisien determinasi (R^2) dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap variasi naik turunnya variabel terikat. Nilai (R^2) yang kecil (mendekati nol) artinya kemampuan variabel dalam menjelaskan variabel terikat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel bebas (Prayitno, 2010). Berikut formula dari nilai koefisien determinasi (R^2):

$$R^2 = \frac{\sum y^{*2}}{\sum y^2}$$

Keterangan:

y = nilai y aktual

y^* = nilai y estimasi

Kriteria pengujian determinasi berganda sebagai berikut:

1. (R^2) = 0, artinya tidak ada hubungan antara X dan Y
2. (R^2) = 1, artinya regresi tepat

3.2.4 Uji Asumsi Klasik

3.2.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi jika terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antar variabel bebas sehingga

sulit untuk memisahkan antar variabel bebas tersebut secara individu terhadap variabel terikat. Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas karena multikolinearitas akan menyebabkan koefisien regresi bernilai kecil dan standar error regresi bernilai besar sehingga pengujian variabel bebas secara individu akan menjadi tidak signifikan.

Ghozali (2001) berpendapat bahwa untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi yaitu dengan cara menganalisa matrik korelasi variabel bebas apabila terdapat korelasi antar variabel bebas cukup tinggi (lebih besar dari 0.80) yang berarti terdapat indikasi adanya multikolinearitas.

3.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model adalah dengan cara menggunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Apabila hasil regresi terhadap seluruh variabel hasilnya memiliki nilai signifikansi masing-masing lebih dari 0.05 maka dalam model tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.2.4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi dengan variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Konsep pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Jarque-Berra test*. Pengambilan keputusan dalam pendekatan *Jarque-Berra test* yaitu apabila probabilitas lebih dari 0.05 maka variabel-variabel tersebut terdistribusi normal, dan jika probabilitas kurang dari 0.05 maka variabel-variabel tersebut terdistribusi tidak normal.

3.3 Definisi Variabel Operasional

Definisi operasional bertujuan agar variabel penelitian, baik variabel dependen maupun independen yang telah ditetapkan dan dioperasionalkan sehingga memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang

menjelaskan titik pusat dari suatu penelitian. Sementara itu variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terdidik, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah pendidikan, upah minimum kabupaten, produk domestik regional bruto dan inflasi. Definisi operasional variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- a. Pengangguran terdidik didefinisikan sebagai rasio antara jumlah pencari kerja yang berpendidikan pada tingkat SLTA keatas terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Pengangguran terdidik yang diteliti yaitu tingkat pengangguran dengan lulusan SMA/SMK ke atas di Jawa Timur tahun 2013-2017 dalam satuan persen.
- b. Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan, pengetahuan dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang. Pendidikan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan kualitas pendidikan dengan data jumlah angkatan kerja lulusan SMA/SMK, Diploma dan Sarjana dibagi dengan jumlah angkatan kerja usia 15 tahun keatas yang diukur dalam persen.

$$TPend = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan}}{\text{Jumlah angkatan kerja 15 tahun keatas}} \times 100 \%$$

Sumber : Arsyad, diolah

- c. Upah Minimum Kabupaten dapat diartikan sebagai imbalan jasa yang diterima seseorang didalam hubungan kerja yang berupa uang dan barang, melalui perjanjian kerja, imbalan jasa diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri dan keluarganya. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan dengan rentang waktu dari 2013-2017, tingkat upah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan satuan rupiah.
- d. Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data Badan Pusat

Statistik dengan rentang waktu dari 2013-2017, Produk domestik regional bruto dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan satuan Milyar rupiah.

- e. Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data Badan Pusat statistik dengan rentang waktu dari 2013-2017, inflasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan satuan persen.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di provinsi Jawa Timur. Keadaan ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka cenderung untuk lebih selektif dan sesuai dengan bidang dan keahliannya dalam memilih pekerjaan sehingga berdampak pada semakin tingginya tingkat pengangguran terdidik.
2. Upah Minimum Kabupaten berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Jawa Timur di tingkat upah berapapun akan tetap tetap bekerja. Hal tersebut terjadi karena kenaikan upah di Jawa Timur diikuti oleh kenaikan harga. Tenaga kerja di Jawa Timur tidak menginginkan upah yang terlalu besar atau terlalu kecil. Namun harapan pekerja/buruh adalah nyaman dalam nilai upah yang diterima untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
3. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena sektor perdagangan dan sektor pertanian serta adanya investasi dapat menyerap tenaga kerja sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur.
4. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di provinsi Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan teori *Phillips* yang menyatakan bahwa peningkatan inflasi akan menyebabkan terjadinya penurunan pengangguran.

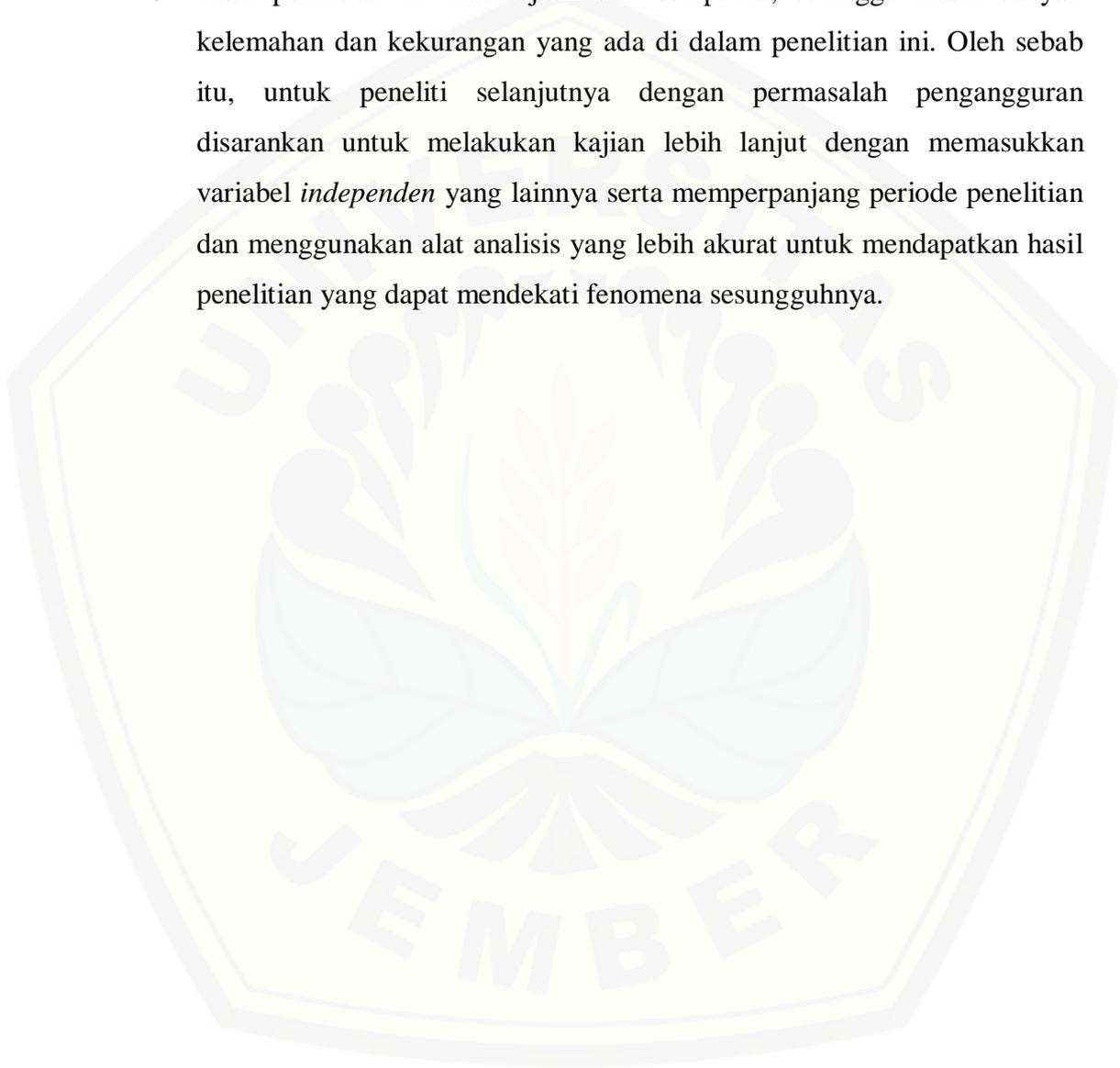
5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah

1. Peningkatan pendidikan baik formal maupun informal untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Perlu menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan SMA/SMK, Diploma, Sarjana agar dapat membuka lapangan kerja sendiri dan tidak bergantung pada kesempatan kerja yang ada di Jawa Timur. Adanya pelatihan kerja agar memiliki keterampilan sehingga dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.
2. Upah Minimum Kabupaten dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Timur. Penentuan Upah Minimum Kabupaten seharusnya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pengusaha dan pegawai. Pengusaha yang kompeten adalah apabila perusahaan mendapat keuntungan maka pekerja menerima upah yang lebih. Hal ini dapat mensejahterakan hidup para pekerja, sehingga produktivitas akan meningkat. Namun, apabila perusahaan mengalami kerugian, pengusaha cukup membayar pekerja yang sesuai tetapi tidak dibawah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran terdidik di provinsi Jawa Timur, maka diharapkan kebijakan dari pemerintah untuk dapat memperhatikan lagi dalam strategi pembangunan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dengan cara menekankan pendekatan ekonomi sektoral, khususnya sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak.
4. Hubungan yang signifikan antara inflasi terhadap tingkat pengangguran menjadi permasalahan apabila tidak ada penanganan. Pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan nilai inflasi dengan mengambil

kebijakan yang tepat serta memberikan kemudahan bagi calon investor dalam hal penanaman modal, menjamin keamanan berinvestasi dan mempromosikan potensi yang dapat dikembangkan di provinsi Jawa Timur.

5. Hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih banyak kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, untuk peneliti selanjutnya dengan permasalahan pengangguran disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel *independen* yang lainnya serta memperpanjang periode penelitian dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat mendekati fenomena sesungguhnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, Desi (2017). Determinan Pengangguran Terdidik Ditinjau dari Perspektif Islam. *Journal Economic Education*. Vol.6 No.2 (234 - 239).
- Alam, Syamsul. 2016. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 12(1).
- Alghofari, Farid. 2016. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2017. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Universitas Diponegoro
- Amir, Amri. (2007). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia. Semarang. *Jurnal Ekonomi Education* Volume 11, Nomor 2, hlm.171-181.
- Anggun Sari (2017). Analisis Faktor-Faktor Pengangguran Terdidik. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*. Vol 7 No, 2, 145-146.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke Empat*. Yogyakarta:BPFE.
- _____. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017*. Jawa Timur. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur.
- _____. 2017. *Inflasi Tahun ke Tahun Jawa Timur Tahun 2012-2017*. Jawa Timur. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur.
- _____. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017*. Jawa Timur. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur.
- _____. 2017. *Tingkat Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017*. Jawa Timur. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur.
- _____. 2017. *Upah Minimum Kota Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017*. Jawa Timur. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur.
- Billy Aji, Satrio. 2016. Pengangguran Terdidik dan Determinannya. Universitas Diponegoro Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 15, Nomor 2, Oktober 2014, hlm.171-181.

- Brenello, Giorgio. 2001. Unemployment, Education and Earning Growth. *The Empirical Economics Letters*. 10(12) : 1248-1257.
- C. Simon Fan, Oded Stark. 2014 International Migration and Education Unemployment. *Journal of Economics and Sustainable Development*. Vol.5, No.11, 2014 (355-367).
- Fatimah, Murin. (2007). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Economic*. Vol-2 No 1, 64 (241-252).
- Fitri Junaidi (2017). Pengangguran Tedidik dan Penanggulangannya. Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 6, Nomor 6*.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika. Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: BPUNDIP.
- Gujarati, D.N. 2015. *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jacob Mincer. 2016. Education and Unemployment. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol 6, No. 1, 297-299.
- Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan danPerencanaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kembar Sari, Anggun. 2012. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 4 (122-130)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Kuncoro, M. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi ke empat, Yogyakarta : YKPN AMP UPP.
- Lipsey. 1997. *Pengantar Makroekonomi*. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Mankiw, N. G. 2003. *Teori Makroekonomi*. Terjemahan Imam Nurmawan. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Martinuksen, Jhon. (2010). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia*. Surabaya: Erlangga.
- Miftahul Huda, Mochamad. 2018. Determinan Pengangguran Terdidik Jawa Timur. *Jurusan IESP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ)*.
- Moelyono. 2012. Analisis Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1997-2011. *Diponegoro : Jurnal of Economic 1(1) : 1-10*.

- Nur, Ayu Isnaini 2015. Kecemasan Pada Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Journal of Economic and Economic Education* Vol.3 No.2 (124 - 136).
- Normalitasi, Anggun. 2011. *Determinan Pengangguran Terbuka di Jawa Timur*. Surabaya : Fakultas Ekonomi Unesa.
- Paul, Samuelson. A. 2010. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Prasetyo, Jarot. 2013. Pengembangan Kewirausahaan Yang Didukung Penelitian Di Bidang Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi Sebagai Cara Alternatif Mengurangi Tingkat Pengangguran Terdidik. *Jurnal Economic and Bussines*. Vol-4 No 2, (250-261).
- Prayitno, Imam. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Simanjuntak, J. Payaman. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta.
- Simanjuntak, P. J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- _____. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia; Edisi ke 2*. Jakarta: Lembaga Penerbit LPFE UI.
- Sjafii, A. 2009. Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004. *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol. 3 No.1 , 73.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPEE UI.
- _____. 2003. *Pengantar Teori Mikro ekonomi*. Edisi Pertama. Jakarta : PT Salemba Empat.
- _____. 2004. *Pengantar Teori Makro ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Makro ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Keempat. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Jakarta:FE UI.
- _____. (2009). *Teori dan kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha ilmu.

- Suparmoko dan Irawan. 2008. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Suparmoko, M, 2002, *Pengantar Ekonomi Makro*, Yogyakarta. BPFE.
- Suroto. 1992. *Strategi pembangunan dan perencanaan kesempatan kerja, edisi ke II*. Yogyakarta: Gadjah Mada universitas.
- Susilawati (2015). Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. Vol 6 No 2, 84-86.
- Syamsul, Alam (2016). Tingkat Pendidikan dan Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi) April 2016, No.XIX ISSN : 1907 – 5480*.
- Tarigan, R. 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan, R. 2012. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2010). *Pembangunan Ekonomi (Edisi Ke sebelas Jilid 1)*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003. Ketenagakerjaan. 25 Maret 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23. Jakarta.
- Wijaya, Kusuma (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pengangguran Terbuka di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi*. Vol 6 No 5, 76-83.
- Zahro, Nauhdatul. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pemabangunan*. 12(1) : 130-138.

Lampiran 1. Data Asli

Tabel Tingkat Pengangguran Terdidik Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (persen)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Pacitan	1,02	0,99	1,08	0,97	1,11
Kab. Ponorogo	3,14	3,25	3,66	3,68	3,66
Kab. Trenggalek	2,98	4,04	4,2	2,46	2,98
Kab. Blitar	2,82	3,64	3,08	2,79	3,91
Kab. Tulungagung	3,1	2,71	2,42	3,95	2,42
Kab. Kediri	4,08	4,65	4,91	5,02	4,08
Kab. Malang	3,75	5,17	4,83	4,95	5,51
Kab. Lumajang	4,6	2,01	2,83	2,6	2,01
Kab. Jember	3,77	3,94	4,64	4,77	3,94
Kab. Banyuwangi	3,41	4,65	7,17	2,55	3,41
Kab. Bondowoso	3,6	2,04	3,72	1,75	2,04
Kab. Situbondo	3,33	3,01	4,15	3,57	4,15
Kab. Probolinggo	1,92	3,3	1,47	2,51	3,3
Kab. Pasuruan	6,38	4,34	4,43	6,41	2,8
Kab. Sidoarjo	5,37	4,12	3,88	6,3	5,37
Kab. Mojokerto	3,35	6,3	5,37	3,35	3,16
Kab. Jombang	6,72	5,59	4,39	6,11	5,59
Kab. Nganjuk	4,09	4,73	3,93	2,1	4,73
Kab. Madiun	3,99	4,63	3,38	6,99	4,63
Kab. Magetan	3,64	2,96	4,28	6,05	4,28
Kab. Ngawi	2,94	4,97	5,61	3,99	4,97
Kab. Bojonegoro	3,42	5,81	3,21	5,01	3,21
Kab. Tuban	4,13	4,3	3,63	3,03	4,3
Kab. Lamongan	4,75	4,93	4,3	4,1	4,75
Kab. Gresik	6,78	4,55	5,06	5,67	4,55
Kab. Bangkalan	5,13	6,78	5,68	5	5,13
Kab. Sampang	1,71	4,68	2,22	2,51	2,22
Kab. Pamekasan	2,29	2,17	2,14	4,26	2,17
Kab. Sumenep	1,14	2,56	1,01	2,07	2,61
Kota Kediri	8,12	7,92	7,66	8,46	7,92
Kota Blitar	3,68	6,17	5,71	3,8	6,17
Kota Malang	7,96	7,73	7,22	7,28	6,5
Kota Probolinggo	5,26	4,48	5,16	4,01	8,53
Kota Pasuruan	4,54	5,41	6,09	5,57	7,57
Kota Mojokerto	7,52	5,73	4,42	4,88	6,89
Kota Madiun	6,89	6,57	6,93	7,1	6,93
Kota Surabaya	9,27	9,32	8,82	10,01	9,82
Kota Batu	3,51	2,3	2,43	4,29	3,81
Jawa Timur	4,11	4,30	4,19	4,47	4,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018 (data diolah)

Tabel Persentase Kualitas Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Pacitan	5.24	4.99	5.41	5.88	5.53
Kabupaten Ponorogo	3.74	3.94	4.35	5.4	6.96
Kabupaten Trenggalek	4.5	4.81	4.94	4.79	6.12
Kabupaten Tulungagung	4.14	3.88	4.14	4.69	8.03
Kabupaten Blitar	4.69	5.25	3.92	5.1	6.87
Kabupaten Kediri	3.71	2.63	3.59	4.62	8.01
Kabupaten Malang	3.66	3.26	3.71	4.31	6.49
Kabupaten Lumajang	3.85	3.86	4.63	3.75	4.90
Kabupaten Jember	2.92	2.88	3.16	3.18	5.61
Kabupaten Banyuwangi	3.87	3.33	3.18	4.25	6.07
Kabupaten Bondowoso	4.81	3.3	3.64	3.93	4.41
Kabupaten Situbondo	4.49	3.23	2.73	4.2	5.93
Kabupaten Probolinggo	3.86	3.82	4.09	5.49	5.19
Kabupaten Pasuruan	3.2	3.03	2.67	3.39	6.88
Kabupaten Sidoarjo	2.25	1.81	1.92	3.43	16.93
Kabupaten Mojokerto	9.71	10.52	9.86	10.89	9.68
Kabupaten Jombang	3.75	4.55	4.8	3.83	9.03
Kabupaten Nganjuk	3.94	3.83	5.82	4.98	7.8
Kabupaten Madiun	5.32	4.19	5.54	4.79	8.25
Kabupaten Magetan	3.84	3.7	4.28	4.45	9.80
Kabupaten Ngawi	5.51	5.03	6.59	5.48	6.11
Kabupaten Bojonegoro	3.77	3.33	3.65	3.58	6.70
Kabupaten Tuban	2.41	2.54	3.29	3.88	6.1
Kabupaten Lamongan	2.72	3.04	2.31	3.65	7.83
Kabupaten Gresik	5.67	4.52	6.2	5.33	12.7
Kabupaten Bangkalan	6.76	6.76	5.09	7.15	4.02
Kabupaten Sampang	2.96	3.02	4.6	2.69	2.95
Kabupaten Pamekasan	1.36	1.89	2.11	2.83	6.84
Kabupaten Sumenep	3.16	4.04	3.74	5.58	5.2
Kota Kediri	2.54	2.89	3.09	3.39	16.04
Kota Blitar	10.91	10.55	12.5	11.09	14.87
Kota Malang	9.46	10.99	13.37	14.39	17.39
Kota Probolinggo	16.06	14.87	16.85	15.44	12.15
Kota Pasuruan	7.53	8.6	7.49	8.2	12.92
Kota Mojokerto	9	9.2	7.07	11.16	15.75
Kota Madiun	12.77	8.82	12.57	10.77	18.49
Kota Surabaya	12.45	16.59	17.7	17.47	16.80
Kota Batu	12.48	11.04	12.64	14.57	11.36
Jawa Timur	6.33	9.1	7.68	8.98	8.22

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018 (data diolah)

Tabel Tingkat Upah Minimum Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Pacitan	750000	887200	1000000	1150000	1283000
Kab. Ponorogo	745000	924000	1000000	1150000	1283000
Kab. Trenggalek	760000	903900	1000000	1150000	1283000
Kab. Tulungagung	815000	1007900	1107000	1237000	1420000
Kab. Blitar	820000	946800	1000000	1260000	1405000
Kab. Kediri	999000	1089500	1135000	1305200	1475000
Kab. Malang	1130500	1343700	1635000	1882200	2188000
Kab. Lumajang	825400	1011900	1120000	1288000	1437000
Kab. Jember	920000	1091900	1270000	1460500	1629000
Kab. Banyuwangi	915000	1086400	1240000	1426000	1599000
Kab. Bondowoso	800000	946000	1105000	1270700	1417000
Kab. Situbondo	802500	1048000	1071000	1209900	1374000
Kab. Probolinggo	888500	1198600	1353700	1556800	1736000
Kab. Pasuruan	1252000	1720000	2190000	2700000	2800000
Kab. Sidoarjo	1252000	1720000	2190000	2705000	3037500
Kab. Mojokerto	1234000	1700000	2050000	2695000	3030000
Kab. Jombang	978200	1200000	1500000	1725000	1924000
Kab. Nganjuk	785000	960200	1131000	1265000	1411000
Kab. Madiun	775000	960700	1045000	1196000	1394000
Kab. Magetan	750000	866200	1000000	1150000	1283000
Kab. Ngawi	785000	960200	1131000	1265000	1411000
Kab. Bojonegoro	930000	1023500	1140000	1311000	1462000
Kab. Tuban	970000	1144400	1370000	1575500	1757000
Kab. Lamongan	950000	1075700	1220000	1410000	1573000
Kab. Gresik	1257000	1740000	2195000	2707500	3042500
Kab. Bangkalan	885000	983000	1102000	1267300	1414000
Kab. Sampang	800000	1104600	1120000	1231600	1387000
Kab. Pamekasan	975000	1059600	1090000	1201700	1350000
Kab. Sumenep	825000	965000	1090000	1253500	1398000
Kota Kediri	1037500	1128400	1165000	1339700	1494000
Kota Blitar	815000	924800	1000000	1243200	1405000
Kota Malang	1132200	1340300	1587000	1882200	2099000
Kota Probolinggo	885000	1103200	1250000	1437500	1603000
Kota Pasuruan	975000	1195800	1360000	1575000	1757000
Kota Mojokerto	875000	1040000	1250000	1437500	1603000
Kota Madiun	812500	953000	1066000	1250000	1394000
Kota Surabaya	1257000	1740000	2200000	2710000	3045000
Kota Batu	1100200	1268000	1580000	1877000	2026000
Jawa Timur	933250	1141115.8	1317334.2	1546250	1727078.9

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018 (data diolah)

Tabel Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Konstan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Pacitan	7705	8153,2	8582,2	9019,5	9489,1
Kab. Ponorogo	10038,4	10557,3	11104,5	11687,9	12305,7
Kab. Trenggalek	8959,5	9482,2	94166,2	10501,6	11026,5
Kab. Tulungagung	189992	20144,4	21265,2	22326,6	23446,4
Kab. Blitar	18054,5	18965,2	19920,2	20925,5	21991,4
Kab. Kediri	20644,1	21824,1	22893,2	24007,7	25211,9
Kab. Malang	47076,2	49711,4	52550,4	55317,8	58247,3
Kab. Lumajang	16053,4	19940,5	17851,9	18676,9	19555,2
Kab. Jember	37262,6	39224,5	41971,7	44222,6	46526,6
Kab. Banyuwangi	37235,7	39649,9	42005,7	44529,9	46924,6
Kab. Bondowoso	9583,4	10140,1	10652,4	11179,6	11735,6
Kab. Situbondo	9411,6	10005,3	10572,4	11086,5	11640,8
Kab. Probolinggo	16936,8	17838,2	18682,2	19571,6	20504,1
Kab. Pasuruan	70167,1	74928,8	80105,4	84415,7	89011,2
Kab. Sidoarjo	93543,9	99975,7	106434,3	112012,9	118179,2
Kab. Mojokerto	39047,1	41579,2	44292,6	46792,3	49321,9
Kab. Jombang	19514,8	20672,3	21793,2	22960,2	24199,1
Kab. Nganjuk	12767,2	13473,8	14142,9	14875,4	15661,8
Kab. Madiun	9135,7	9654,1	10169,7	10704,9	11268,9
Kab. Magetan	9251,2	9789,6	10169,7	10704,9	11268,9
Kab. Ngawi	9568,2	10203	10681	11223,1	11843,3
Kab. Bojonegoro	38136,1	38993,7	39934,80	46892,80	57187,40
Kab. Tuban	31836,3	33836,7	35519,90	37256	39081,80
Kab. Lamongan	18562,7	19836,1	21099,9	22316,9	23623,8
Kab. Gresik	67248,8	71304,5	76336	81360,40	85835,10
Kab. Bangkalan	16173,7	16204	16804	16906,80	17018,60
Kab. Sampang	10910,9	11622	11632,90	11874,50	12606,80
Kab. Pamekasan	7894	8369,6	8368,5	9316,90	9815,80
Kab. Sumenep	17665	20162,8	21476,90	21750,60	22311,70
Kota Kediri	63185,1	65407	69232,9	72945,5	76959,4
Kota Blitar	3236,6	3445,2	3649,6	3856,9	3969,9
Kota Malang	35355,7	37541,7	39724,7	41952,1	44303,9
Kota Probolinggo	5552,1	5911,3	6261,9	6628,8	6292,4
Kota Pasuruan	4051,2	4314,1	4901,6	5202,5	5211,5
Kota Mojokerto	3358,4	3566,4	3774,6	3663,1	3759,9
Kota Madiun	6937,7	7470,7	7331,8	7523,1	7954,7
Kota Surabaya	265892,1	286507,2	305947,6	324215,2	343652,6
Kota Batu	6968,2	7473,6	7357,1	9145,9	9750,9
Jawa Timur	1124464,40	1192789,80	1262684,50	1331376,10	1405561,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018 (data diolah)

Tabel Inflasi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (persen)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Pacitan	17,53	16,12	15,93	15,04	14,73
Kab. Ponorogo	8,74	7,45	2,91	4,55	4,58
Kab. Trenggalek	4,73	6,73	6,39	7,92	7,73
Kab. Tulungagung	17,29	16,85	15,19	15,82	16,79
Kab. Blitar	13,55	13,22	5,31	5,23	6,76
Kab. Kediri	5,25	5,45	5,91	6,61	6,72
Kab. Malang	9,29	10,16	10,39	11,26	11,36
Kab. Lumajang	8,20	7,71	6,97	6,01	4,01
Kab. Jember	3,62	4,23	3,75	3,17	3,86
Kab. Banyuwangi	5,94	6,40	6,96	7,30	7,13
Kab. Bondowoso	4,73	4,71	4,51	4,55	4,09
Kab. Situbondo	4,62	4,66	4,97	4,51	4,86
Kab. Probolinggo	6,20	5,83	5,93	8,39	8,06
Kab. Pasuruan	7,03	6,59	6,75	7,04	6,66
Kab. Sidoarjo	7,77	6,86	6,00	6,07	6,48
Kab. Mojokerto	6,03	4,65	3,08	3,54	3,99
Kab. Jombang	7,77	6,86	6,00	6,07	6,48
Kab. Nganjuk	7,77	6,86	6,00	6,07	6,48
Kab. Madiun	8,45	8,93	17,53	16,12	15,93
Kab. Magetan	13,42	10,86	8,74	7,45	7,91
Kab. Ngawi	5,01	4,98	4,73	6,73	6,39
Kab. Bojonegoro	8,24	9,12	17,29	16,85	15,19
Kab. Tuban	14,81	13,89	13,55	13,22	13,11
Kab. Lamongan	5,67	5,80	5,25	5,45	5,91
Kab. Gresik	7,36	8,73	9,29	10,16	10,39
Kab. Bangkalan	9,66	8,00	8,20	7,71	6,97
Kab. Sampang	6,61	6,72	6,65	6,48	7,04
Kab. Pamekasan	6,61	6,72	6,65	6,48	7,04
Kab. Sumenep	5,88	4,61	4,73	4,71	4,51
Kota Kediri	4,47	4,58	4,62	4,66	4,97
Kota Blitar	5,89	6,75	6,20	5,83	5,93
Kota Malang	7,59	7,65	7,03	6,59	6,75
Kota Probolinggo	4,57	5,85	7,77	6,86	6,00
Kota Pasuruan	6,79	6,70	6,03	4,65	3,08
Kota Mojokerto	2,93	3,19	2,77	2,69	2,74
Kota Madiun	4,41	4,77	4,66	4,02	3,81
Kota Surabaya	2,74	3,02	2,74	3,62	3,99
Kota Batu	3,81	3,84	3,99	3,89	4,04
Jawa Timur	7,39	7,29	7,14	7,19	7,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018 (data diolah)

Lampiran 2. Data Analisis

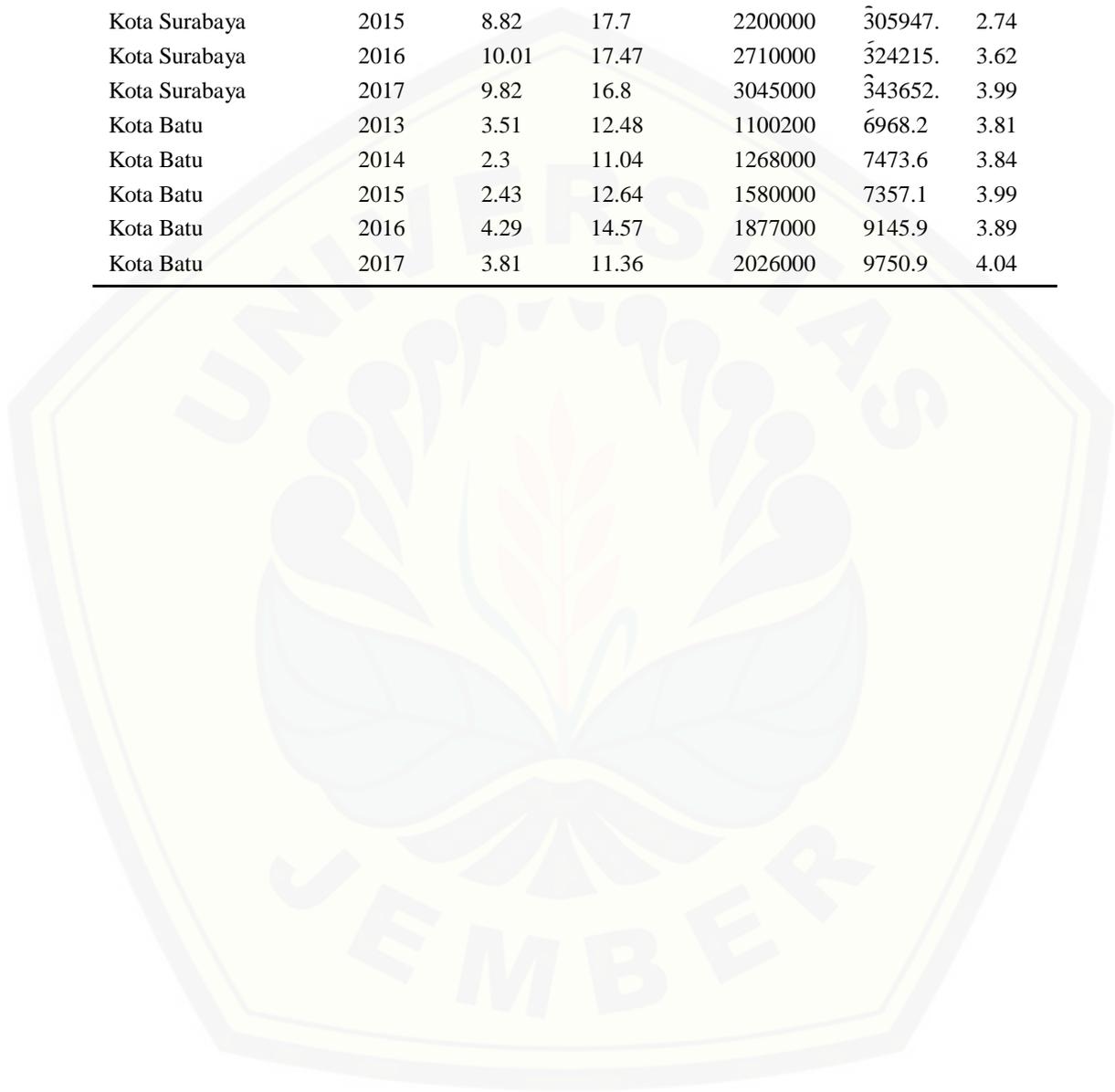
Kabupaten/Kota	Tahun	TPT	Pendidikan	UMK	PDRB	Inflasi
Kab. Pacitan	2013	1.02	5.24	750000	7705	17.53
Kab. Pacitan	2014	0.99	4.99	887200	8153.2	16.12
Kab. Pacitan	2015	1.08	5.41	1000000	8582.2	15.93
kab. Pacitan	2016	0.97	5.88	1150000	9019.5	15.04
Kab. Pacitan	2017	1.1	5.53	1283000	9489.1	14.73
Kab. Ponorogo	2013	3.14	3.74	745000	10038.4	8.74
Kab. Ponorogo	2014	3.25	3.94	924000	10557.3	7.45
Kab. Ponorogo	2015	3.66	4.35	1000000	11104.5	2.91
Kab. Ponorogo	2016	3.68	5.4	1150000	11687.9	4.55
Kab. Ponorogo	2017	3.66	6.96	1283000	12305.7	4.58
Kab. Trenggalek	2013	2.98	4.5	760000	8959.5	4.73
Kab. Trenggalek	2014	4.04	4.81	903900	9482.2	6.73
Kab. Trenggalek	2015	4.2	4.94	1000000	94166.2	6.39
Kab. Trenggalek	2016	2.46	4.79	1150000	10501.6	7.92
Kab. Trenggalek	2017	2.98	6.12	1283000	11026.5	7.73
Kab. Tulungagung	2013	3.1	4.14	815000	189992	17.29
Kab. Tulungagung	2014	2.71	3.88	1007900	20144.4	16.85
Kab. Tulungagung	2015	2.42	4.14	1107000	21265.2	15.19
Kab. Tulungagung	2016	3.95	4.69	1237000	22326.6	15.82
Kab. Tulungagung	2017	2.42	8.03	1420000	23446.4	16.79
Kab. Blitar	2013	2.82	4.69	820000	18054.5	13.55
Kab. Blitar	2014	3.64	5.25	946800	18965.2	13.22
Kab. Blitar	2015	3.08	3.92	1000000	19920.2	5.31
Kab. Blitar	2016	2.79	5.1	1260000	20925.5	5.23
Kab. Blitar	2017	3.91	6.87	1405000	21991.4	6.76
Kab. Kediri	2013	4.08	3.71	999000	20644.1	5.25
Kab. Kediri	2014	4.65	2.63	1089500	21824.1	5.45
Kab. Kediri	2015	4.91	3.59	1135000	22893.2	5.91
Kab. Kediri	2016	5.02	4.62	1305200	24007.7	6.61
Kab. Kediri	2017	4.08	8.01	1475000	25211.9	6.72
Kab. Malang	2013	3.75	3.66	1130500	47076.2	9.29
Kab. Malang	2014	5.17	3.26	1343700	49711.4	10.16
Kab. Malang	2015	4.83	3.71	1635000	52550.4	10.39
Kab. Malang	2016	4.95	4.31	1882200	55317.8	11.26
Kab. Malang	2017	5.51	6.49	2188000	58247.3	11.36
Kab. Lumajang	2013	4.6	3.85	825400	16053.4	8.2
Kab. Lumajang	2014	2.01	3.86	1011900	19940.5	7.71
Kab. Lumajang	2015	2.83	4.63	1120000	17851.9	6.97
Kab. Lumajang	2016	2.6	3.75	1288000	18676.9	6.01
Kab. Lumajang	2017	2.01	4.9	1437000	19555.2	4.01
Kab. Jember	2013	3.77	2.92	920000	37262.6	3.62

Kab. Jember	2014	3.94	2.88	1091900	39224.5	4.23
Kab. Jember	2015	4.64	3.16	1270000	41971.7	3.75
Kab. Jember	2016	4.77	3.18	1460500	44222.6	3.17
Kab. Jember	2017	3.94	5.61	1629000	46526.6	3.86
Kab. Banyuwangi	2013	3.41	3.87	915000	37235.7	5.94
Kab. Banyuwangi	2014	4.65	3.33	1086400	39649.9	6.4
Kab. Banyuwangi	2015	7.17	3.18	1240000	42005.7	6.96
Kab. Banyuwangi	2016	2.55	4.25	1426000	44529.9	7.3
Kab. Banyuwangi	2017	3.41	6.07	1599000	46924.6	7.13
Kab. Bondowoso	2013	3.6	4.81	800000	9583.4	4.73
Kab. Bondowoso	2014	2.04	3.3	946000	10140.1	4.71
Kab. Bondowoso	2015	3.72	3.64	1105000	10652.4	4.51
Kab. Bondowoso	2016	1.75	3.93	1270700	11179.6	4.55
Kab. Bondowoso	2017	2.04	4.41	1417000	11735.6	4.09
Kab. Situbondo	2013	3.33	4.49	802500	9411.6	4.62
Kab. Situbondo	2014	3.01	3.23	1048000	10005.3	4.66
Kab. Situbondo	2015	4.15	2.73	1071000	10572.4	4.97
Kab. Situbondo	2016	3.57	4.2	1209900	11086.5	4.51
Kab. Situbondo	2017	4.15	5.93	1374000	11640.8	4.86
Kab. Probolinggo	2013	1.92	3.86	888500	16936.8	6.2
Kab. Probolinggo	2014	3.3	3.82	1198600	17838.2	5.83
Kab. Probolinggo	2015	1.47	4.09	1353700	18682.2	5.93
Kab. Probolinggo	2016	2.51	5.49	1556800	19571.6	8.39
Kab. Probolinggo	2017	3.3	5.19	1736000	20504.1	8.06
Kab. Pasuruan	2013	6.38	3.2	1252000	70167.1	7.03
Kab. Pasuruan	2014	4.34	3.03	1720000	74928.8	6.59
Kab. Pasuruan	2015	4.43	2.67	2190000	80105.4	6.75
Kab. Pasuruan	2016	6.41	3.39	2700000	84415.7	7.04
Kab. Pasuruan	2017	2.8	6.88	2800000	89011.2	6.66
Kab. Sidoarjo	2013	5.37	2.25	1252000	93543.9	7.77
Kab. Sidoarjo	2014	4.12	1.81	1720000	99975.7	6.86
Kab. Sidoarjo	2015	3.88	1.92	2190000	106434.	6
Kab. Sidoarjo	2016	6.3	3.43	2705000	112012.	6.07
Kab. Sidoarjo	2017	5.37	16.93	3037500	118179.	6.48
Kab. Mojokerto	2013	3.35	9.71	1234000	39047.1	6.03
Kab. Mojokerto	2014	3.16	10.52	1700000	41579.2	4.65
Kab. Mojokerto	2015	3.81	9.86	2050000	44292.6	3.08
Kab. Mojokerto	2016	4.05	10.89	2695000	46792.3	3.54
Kab. Mojokerto	2017	4.47	9.68	3030000	49321.9	3.99
Kab. Jombang	2013	6.72	3.75	978200	19514.8	7.77
Kab. Jombang	2014	5.59	4.55	1200000	20672.3	6.86
Kab. Jombang	2015	4.39	4.8	1500000	21793.2	6
Kab. Jombang	2016	6.11	3.83	1725000	22960.2	6.07
Kab. Jombang	2017	5.59	9.03	1924000	24199.1	6.48
Kab. Nganjuk	2013	4.09	3.94	785000	12767.2	7.77

Kab. Nganjuk	2014	4.73	3.83	960200	13473.8	6.86
Kab. Nganjuk	2015	3.93	5.82	1131000	14142.9	6
Kab. Nganjuk	2016	2.1	4.98	1265000	14875.4	6.07
Kab. Nganjuk	2017	4.73	7.8	1411000	15661.8	6.48
Kab. Madiun	2013	3.99	5.32	775000	9135.7	8.45
Kab. Madiun	2014	4.63	4.19	960700	9654.1	8.93
Kab. Madiun	2015	3.38	5.54	1045000	10169.7	17.53
Kab. Madiun	2016	6.99	4.79	1196000	10704.9	16.12
Kab. Madiun	2017	4.63	8.25	1394000	11268.9	15.93
Kab. Magetan	2013	3.64	3.84	750000	9251.2	13.42
Kab. Magetan	2014	2.96	3.7	866200	9789.6	10.86
Kab. Magetan	2015	4.28	4.28	1000000	10169.7	8.74
Kab. Magetan	2016	6.05	4.45	1150000	10704.9	7.45
Kab. Magetan	2017	4.28	9.8	1283000	11268.9	7.91
Kab. Ngawi	2013	2.94	5.51	785000	9568.2	5.01
Kab. Ngawi	2014	4.97	5.03	960200	10203	4.98
Kab. Ngawi	2015	5.61	6.59	1131000	10681	4.73
Kab. Ngawi	2016	3.99	4.48	1265000	11223.1	6.73
Kab. Ngawi	2017	4.97	6.11	1411000	11223.1	6.39
Kab. Bojonegoro	2013	3.42	3.77	930000	38136.1	8.24
Kab. Bojonegoro	2014	5.81	3.33	1023500	38993.7	9.12
Kab. Bojonegoro	2015	3.21	3.65	1140000	39934.8	17.29
Kab. Bojonegoro	2016	5.01	3.58	1311000	46892.8	16.85
Kab. Bojonegoro	2017	3.21	6.7	1462000	57187.4	15.19
Kab. Tuban	2013	4.13	2.41	970000	31836.3	14.81
Kab. Tuban	2014	4.3	2.54	1144400	33836.7	13.89
Kab. Tuban	2015	3.63	3.29	1370000	35519.9	13.55
Kab. Tuban	2016	3.03	3.88	1575500	37256	13.22
Kab. Tuban	2017	4.3	6.1	1757000	39081.8	5.31
Kab. Lamongan	2013	4.75	2.72	950000	18562.7	5.67
Kab. Lamongan	2014	4.93	3.04	1075700	19836.1	5.8
Kab. Lamongan	2015	4.3	2.31	1220000	21099.9	5.25
Kab. Lamongan	2016	4.1	3.65	1410000	22316.9	5.45
Kab. Lamongan	2017	4.75	7.83	1573000	23623.8	5.91
Kab. Gresik	2013	6.78	5.67	1257000	67248.8	7.36
Kab. Gresik	2014	4.55	4.52	1740000	71304.5	8.73
Kab. Gresik	2015	5.06	6.2	2195000	76336	9.29
Kab. Gresik	2016	5.67	5.33	2707500	81360.4	10.16
Kab. Gresik	2017	4.55	12.7	3042500	85835.1	10.39
Kab. Bangkalan	2013	5.13	6.67	885000	16173.7	9.66
Kab. Bangkalan	2014	6.78	6.76	983000	16204	8
Kab. Bangkalan	2015	5.68	5.09	1102000	16804	8.2
Kab. Bangkalan	2016	5	7.15	1267300	16906.8	7.71
Kab. Bangkalan	2017	5.13	4.02	1414000	17018.6	6.97
Kab. Sampang	2013	1.71	2.96	800000	10910.9	6.61

Kab. Sampang	2014	4.68	3.02	1104600	11622	6.72
Kab. Sampang	2015	2.22	4.6	1120000	11632.9	6.65
Kab. Sampang	2016	2.51	2.69	1231600	11874.5	6.48
Kab. Sampang	2017	2.22	2.95	1387000	12606.8	7.04
Kab. Pamekasan	2013	2.29	1.36	975000	7894	6.61
Kab. Pamekasan	2014	2.17	1.89	1059600	8369.6	6.72
Kab. Pamekasan	2015	2.14	2.11	1090000	8368.5	6.65
Kab. Pamekasan	2016	4.26	2.83	1201700	9316.90	6.48
Kab. Pamekasan	2017	2.17	6.84	1350000	9815.80	7.04
Kab. Sumenep	2013	1.14	3.16	825000	17665	5.88
Kab. Sumenep	2014	2.56	4.04	965000	20162.8	4.61
Kab. Sumenep	2015	1.01	3.74	1090000	21476.9	4.73
Kab. Sumenep	2016	2.07	5.58	1253500	21750.6	4.71
Kab. Sumenep	2017	2.61	5.2	1398000	22311.7	4.51
Kota Kediri	2013	8.12	2.54	1037500	63185.1	4.47
Kota Kediri	2014	7.92	2.89	1128400	65407	4.58
Kota Kediri	2015	7.66	3.09	1165000	69232.9	4.62
Kota Kediri	2016	8.46	3.39	1339700	72945.5	4.66
Kota Kediri	2017	7.92	6.85	1494000	76959.4	4.97
Kota Blitar	2013	3.68	10.91	815000	3236.6	5.89
Kota Blitar	2014	6.17	10.55	924800	3445.2	6.75
Kota Blitar	2015	5.71	12.5	1000000	3649.6	6.2
Kota Blitar	2016	3.8	11.09	1243200	3856.9	5.83
Kota Blitar	2017	6.17	14.87	1405000	3969.9	5.93
Kota Malang	2013	7.96	9.46	1132200	35355.7	7.59
Kota Malang	2014	7.73	10.99	1340300	37541.7	7.65
Kota Malang	2015	7.22	13.37	1587000	39724.7	7.03
Kota Malang	2016	7.28	14.39	1882200	41952.1	6.59
Kota Malang	2017	6.5	17.39	2099000	44303.9	6.75
Kota Probolinggo	2013	5.26	16.06	885000	5552.1	4.57
Kota Probolinggo	2014	4.48	14.87	1103200	5911.3	5.85
Kota Probolinggo	2015	5.16	16.85	1250000	6261.9	7.77
Kota Probolinggo	2016	4.01	15.44	1437500	6628.8	6.86
Kota Probolinggo	2017	8.53	12.15	1603000	6292.4	6
Kota Pasuruan	2013	4.54	7.53	975000	4051.2	6.79
Kota Pasuruan	2014	5.41	8.6	1195800	4314.1	6.7
Kota Pasuruan	2015	6.09	7.49	1360000	4901.6	6.03
Kota Pasuruan	2016	5.57	8.2	1575000	5202.5	4.65
Kota Pasuruan	2017	7.57	12.92	1757000	5211.5	3.08
Kota Mojokerto	2013	7.52	9	875000	3358.4	2.93
Kota Mojokerto	2014	5.73	9.2	1040000	3566.4	3.19
Kota Mojokerto	2015	4.42	7.07	1250000	3774.6	2.77
Kota Mojokerto	2016	4.88	11.16	1437500	3663.1	2.69
Kota Mojokerto	2017	6.89	15.75	1603000	3759.9	2.74
Kota Madiun	2013	6.89	12.77	812500	6937.7	4.41

Kota Madiun	2014	6.57	8.82	953000	7470.7	4.77
Kota Madiun	2015	6.93	12.57	1066000	7331.8	4.66
Kota Madiun	2016	7.1	10.77	1250000	7523.1	4.02
Kota Madiun	2017	6.93	18.49	1394000	7954.7	3.81
Kota Surabaya	2013	9.27	12.48	1257000	265892.	2.74
Kota Surabaya	2014	9.32	16.59	1740000	286507.	3.02
Kota Surabaya	2015	8.82	17.7	2200000	305947.	2.74
Kota Surabaya	2016	10.01	17.47	2710000	324215.	3.62
Kota Surabaya	2017	9.82	16.8	3045000	343652.	3.99
Kota Batu	2013	3.51	12.48	1100200	6968.2	3.81
Kota Batu	2014	2.3	11.04	1268000	7473.6	3.84
Kota Batu	2015	2.43	12.64	1580000	7357.1	3.99
Kota Batu	2016	4.29	14.57	1877000	9145.9	3.89
Kota Batu	2017	3.81	11.36	2026000	9750.9	4.04



Lampiran 3. Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel

a. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.088662	(37,148)	0.0000
Cross-section Chi-square	108.718419	37	0.0000

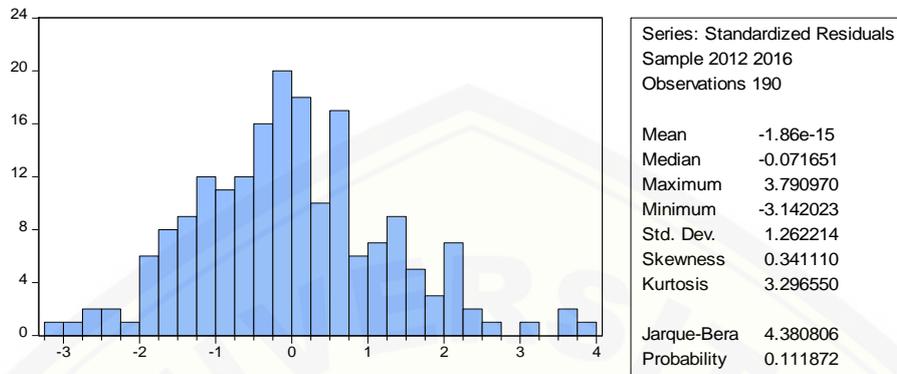
b. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.627441	4	0.8039

Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



b. Uji Multikolinearitas

	PND	UMK	PDRB	INFL
PND	1.000.000	0.322114	0.337664	-0.27081
UMK	0.322114	1.000.000	0.515932	-0.14006
PDRB	0.337664	0.515932	1.000.000	-0.08127
INFL	-0.27081	-0.14006	-0.08127	1.000.000

c. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/12/19 Time: 12:29
 Sample: 2012 2016
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.840043	0.435796	1.927607	0.0558
PND	0.014741	0.039149	0.376534	0.7071
UMK	-1.47E-07	1.76E-07	-0.834721	0.4052
PDRB	-9.80E-08	1.96E-06	-0.049971	0.9602
INFL	0.029125	0.030387	0.958451	0.3394

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.309118	Mean dependent var	0.977847
Adjusted R-squared	0.117725	S.D. dependent var	0.794948
S.E. of regression	0.746690	Akaike info criterion	2.445961
Sum squared resid	82.51686	Schwarz criterion	3.163724
Log likelihood	-190.3663	Hannan-Quinn criter.	2.736716
F-statistic	1.615097	Durbin-Watson stat	2.521588
Prob(F-statistic)	0.020424		

Lampiran 5. Hasil Estimasi Model Regresi *Random Effect*

Dependent Variable: PT
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 04/12/19 Time: 12:24
 Sample: 2012 2016
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.555994	0.481732	-5.305842	0.0000
PND	0.259519	0.033099	7.840598	0.0000
UMK	2.09E-07	2.27E-07	0.918870	0.3594
PDRB	-1.16E-05	2.31E-06	-5.020493	0.0000
INFL	-0.071130	0.032364	-2.197788	0.0292

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.738571	0.3229
Idiosyncratic random		1.069422	0.6771

Weighted Statistics			
R-squared	0.439760	Mean dependent var	2.403079
Adjusted R-squared	0.427646	S.D. dependent var	1.404474
S.E. of regression	1.062542	Sum squared resid	208.8641
F-statistic	36.30384	Durbin-Watson stat	1.808599
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.545087	Mean dependent var	4.421158
Sum squared resid	301.1120	Durbin-Watson stat	1.254522